

KATALOG: 3302001.35

ISSN 2747-2566

STATISTIK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PROVINSI JAWA TIMUR

2023

VOLUME 9, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KATALOG: 3302001.35

ISSN 2747-2566

STATISTIK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PROVINSI JAWA TIMUR

2023

VOLUME 9, 2024

<https://jatim.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

STATISTIK PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR 2023

Volume 9, 2024

Katalog: 3302001.35

ISSN: 2747-2566

Nomor Publikasi: 35000.24027

Ukuran Buku: B5 JIS

Jumlah Halaman: xii+59 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Penerbit:

©BPS Provinsi Jawa Timur

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, paxel.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

TIM PENYUSUN

Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2023

Volume 9, 2024

Pengarah

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.

Penanggung Jawab

Muhammad Suharsa, S.ST., M.Si

Penyunting

Natria Nur Wulan, S.Si., MM.

Novi Rosiana, S.ST.

Penulis Naskah dan Pengolah Data

Vidya Nurina Paramita, S.ST., M.Si.

Penata Letak

Vidya Nurina Paramita, S.ST., M.Si.

Nizar Irsyad, S.ST.

KATA PENGANTAR

Data perumahan yang berkesinambungan merupakan data yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan. Oleh karenanya, BPS Provinsi Jawa Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, membantu pemerintah memberikan gambaran data perumahan guna mendukung sehingga pembangunan berjalan dengan baik di Jawa Timur. Susenas yang bertujuan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk Jawa Timur dengan pendekatan rumah tangga, dapat digunakan sebagai salah satu rujukan data pendukung dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu sektor dalam pembangunan yaitu sektor perumahan.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi para pengguna data, serta pengambil kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman. Dengan demikian sasaran dan target pembangunan perumahan dan pemukiman dapat direncanakan dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam terwujudnya laporan eksekutif ini diucapkan terima kasih. Saran serta kritik yang membangun akan sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan berikutnya. Demikian, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Juli 2024
Kepala BPS Provinsi Jawa Timur,



Dr. Ir. Zulkipli, M.Si.



DAFTAR ISI**Statistik Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Timur 2023
Volume 9, 2024**

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan	3
Bab II Metodologi	5
2.1 Sumber Data.....	5
2.2 Konsep dan Definisi	5
Bab III Ulasan.....	13
3.1 Penguasaan Tempat Tinggal	13
3.1.1 Keluarga yang Tinggal Dalam Bangunan Sensus	13
3.1.2 Status Penguasaan Tempat Tinggal.....	14
3.2 Kondisi Fisik Bangunan.....	17
3.2.1 Penggunaan Atap Terluas	17
3.2.2 Penggunaan Dinding Terluas.....	20
3.2.3 Jenis Lantai Terluas	23
3.2.4 Luas Lantai Per Kapita.....	26
3.3 Fasilitas yang Dimiliki Rumah Tangga	29
3.3.1 Sumber Air Untuk Minum	29
3.3.2 Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/DII.....	32
3.3.3 Jarak Sumber Air Minum dan Sumber Air Mandi/Cuci/ DII ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran	34
3.3.4 Bahan Bakar Untuk Memasak	38
3.3.5 Sumber Penerangan	41
3.3.6 Fasilitas BAB (Buang Air Besar)	43
3.3.7 Jenis Kloset yang Digunakan	45
3.3.8 Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja	48
3.4 Kesehatan Lingkungan	50
3.4.1 Sanitasi Layak	51
3.4.2 Air Minum Layak.....	53
3.4.3 Rumah Layak Huni	56
Daftar Pustaka	59



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2022 dan 2023.....	16
Tabel 2	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2022 dan 2023.....	19
Tabel 3	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2022 dan 2023	22
Tabel 4	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2022 dan 2023	25
Tabel 5	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita, 2023	28
Tabel 6	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum dan Wilayah, 2023.....	29
Tabel 7	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum, 2022 dan 2023.....	31
Tabel 8	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dll dan Wilayah, 2023.....	32
Tabel 9	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan RumahTangga Untuk Mandi/Cuci/Dll, 2022 dan 2023.....	33
Tabel 10	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Jarak Sumber Air Utama Untuk Minum dan Mandi/Cuci/Dll ke Tempat Penampungan Kotoran/Limbah Terdekat, 2022 dan 2023.....	35
Tabel 11	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Utama Untuk Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Limbah Terdekat, 2022 dan 2023.....	36



Tabel 12	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/Dll ke Tempat Penampungan Kotoran/Limbah Terdekat, 2022 dan 2023.....	37
Tabel 13	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak dan Wilayah, 2023.....	38
Tabel 14	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak, 2022 dan 2023.....	40
Tabel 15	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Sumber Utama Penerangan, 2022 dan 2023.....	42
Tabel 16	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2022 dan 2023.....	44
Tabel 17	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat BAB untuk ART Sendiri atau Bersama atau Komunal, 2022 dan 2023.....	47
Tabel 18	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja, 2022 dan 2023.....	48
Tabel 19	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat BAB untuk ART Sendiri atau Bersama atau Komunal, 2022 dan 2023.....	49
Tabel 20	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2022 dan 2023	52
Tabel 21	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, 2022 dan 2023	55
Tabel 22	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2022 dan 2023	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Keluarga yang Tinggal di Dalam Bangunan Sensus/Rumah dan Rata-rata Keluarga di Dalam Bangunan Sensus, 2023	13
Gambar 2	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2023	14
Gambar 3	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Jenis Atap Terluas, 2023.....	17
Gambar 4	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2023.....	20
Gambar 5	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2023.....	24
Gambar 6	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Luas Lantai Per Kapita, 2023.....	26
Gambar 7	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Penggunaan Sumber Utama Penerangan, 2023.....	41
Gambar 8	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2023.....	43
Gambar 9	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Penggunaan Jenis Kloset, 2023.....	46
Gambar 10	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2021–2023.....	51
Gambar 11	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, 2021–2023.....	54
Gambar 12	Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2021–2023.....	56



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumah sebagai kebutuhan dasar sangat diperlukan oleh masyarakat, sebagai tempat tinggal, tempat memperoleh pendidikan informal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Selain itu di dalam undang-undang tersebut menyebutkan juga bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, intervensi pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah telah dan masih memfasilitasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman melalui berbagai program terkait diantaranya program sejuta rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Rumah sebagai tempat hunian yang layak ditinggali idealnya memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi, dapur, jamban (WC) tersendiri, adanya penerangan listrik serta sumber air bersih untuk minum, memasak dan



mandi/cuci/dll. Apabila dilihat dari sudut lingkungan perumahan, tentunya setiap orang mengidamkan rumah yang berlokasi strategis, mudah terjangkau secara akses, bebas banjir, dekat fasilitas umum, mempunyai pekarangan, bersih dan aman dari berbagai gangguan atau polusi lingkungan seperti bau got, asap, dan limbah pabrik, serta tidak bising oleh suara kendaraan bermotor ataupun gangguan lainnya yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban. Namun demikian, terkadang hal ini cukup sulit terpenuhi karena minimnya luas lahan untuk pemukiman dan juga tidak sebandingnya ketersediaan dengan jumlah permintaan. Sudut pandang mengenai lingkungan perumahan, kondisi perumahan beserta fasilitasnya, pada umumnya mencerminkan status sosial ekonomi pemiliknya. Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas bisa berada atau tinggal dalam lingkungan perumahan yang layak huni. Namun, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah hanya bisa tinggal dalam lingkungan rumah yang seadanya bahkan sebagian diantaranya berada pada lingkungan kumuh.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi titik perhatian bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran serta BPS dalam membantu pemerintah adalah melalui penyediaan data yang terkait dengan perumahan dan pemukiman. Oleh karenanya, publikasi ini dibuat sebagai salah satu upaya penyediaan data bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan perumahan dan pemukiman. Di dalam publikasi ini akan diulas beberapa indikator perumahan yang menggambarkan keadaan kesejahteraan dari rumah tangga, seperti atap, dinding, lantai, sanitasi, sumber air minum utama, sumber air mandi/cuci/dll, penerangan dan bahan bakar memasak. Indikator diperoleh melalui kegiatan survei terhadap rumah tangga dengan cara wawancara yang dilakukan oleh petugas yang



sudah dilatih. Pertanyaan pada saat wawancara menjelaskan tentang kondisi perumahan yang ditempati pada saat periode pencacahan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator perumahan yang meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, indicator terkait Kesehatan lingkungan dan lain-lain yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman. Selain itu, diharapkan publikasi ini juga dapat bermanfaat bagi pihak swasta dan para pengguna data lainnya.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam publikasi ini disusun menjadi tiga bab. Bab pertama adalah Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. Bab kedua adalah Metodologi, berisi sumber data serta konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Bab ketiga adalah ulasan, yang berisi ulasan singkat mengenai kondisi perumahan.

Pada publikasi ini, disajikan informasi (data) mengenai kondisi perumahan dan pemukiman rumah tangga di Jawa Timur tahun 2023 dan beberapa diantaranya disajikan data tahun sebelumnya sebagai pembandingan. Data disajikan berupa gambar/grafik atau tabel yang berisi informasi tentang kondisi perumahan menurut penguasaan tempat tinggal yang meliputi status penguasaan rumah; status tanah tempat tinggal dan luas lantai; kondisi fisik bangunan yang meliputi jenis bangunan sensus yang ditempati, atap, dinding dan lantai terluas. Informasi untuk fasilitas tempat



tinggal meliputi sumber air minum rumah tangga, sumber air untuk mandi/cuci/dll, jarak penampungan kotoran (tinja) terhadap sumber air minum rumah tangga, fasilitas tempat buang air besar, bahan bakar, dan sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga. Selain itu disajikan pula data mengenai sanitasi layak, air minum layak, dan rumah layak huni yang selalu menjadi acuan dalam pemenuhan data mengenai perumahan dan pemukiman.

<https://jatim.bps.go.id>



BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2023. Data dan informasi perumahan dari sampel rumah tangga dikumpulkan menggunakan daftar VSEN23.K. Sampel data Susenas sejumlah 3.263 blok sensus atau 32.630 rumah tangga di desain untuk estimasi hingga level kabupaten/kota sehingga hasilnya merupakan kondisi secara makro pada level tersebut dan tidak bisa menggambarkan hingga level dibawahnya (kecamatan, desa/kelurahan atau RT/RW). Data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Maret 2023.

2.2 Konsep dan Definisi

Pencantuman konsep dan definisi bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari tulisan ini. Konsep dan definisi yang digunakan antara lain:

Rumah tangga, rumah tangga yang digunakan dalam penulisan ini adalah rumah tangga biasa yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selain itu, yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain :

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.



- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
- Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus meskipun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Penggunaan Bangunan:

- **Tempat Tinggal Biasa** adalah bangunan tempat tinggal yang seluruhnya hanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga saja.
- **Tempat Tinggal Campuran** adalah bangunan tempat tinggal yang sebagian dari bangunan tempat tinggal tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari rumah tangga dan sebagian lagi untuk keperluan usaha ataupun untuk keperluan lainnya.

Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal :

- **Rumah Milik Sendiri** adalah rumah yang pada saat pencacahan dimiliki oleh salah satu anggota rumah tangga (termasuk yang masih dalam masa kredit).
- **Rumah Kontrak** adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dalam jangka tertentu menurut perjanjian antara pemilik dan pemakai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- **Rumah Sewa** adalah rumah yang disewa oleh rumah tangga dengan pembayaran sewa secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.



- **Rumah Bebas Sewa** adalah rumah yang diperoleh dari pihak lain dan ditempati (didiami) oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.
- **Rumah Dinas** adalah rumah yang dimiliki oleh suatu instansi tempat bekerja dari salah satu anggota rumah tangga, baik dengan membayar sewa maupun tidak.
- **Rumah milik orang tua/famili** adalah rumah bukan milik sendiri, melainkan milik orang tua/famili dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

Status Tanah Tempat Tinggal/Status Hukum Tanah adalah hak untuk mempergunakan tanah tidak termasuk benda-benda lain di dalam tanah seperti bahan-bahan mineral dan minyak, dalam bentuk jenis sertifikat tanah yang dikeluarkan pemerintah atau turun temurun berdasarkan adat yang diakui pemerintah. Status hukum tanah yang dimaksud adalah status hukum dari tanah yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal responden, tanpa memperhatikan status kepemilikan dari tempat tinggal tersebut. Status tanah tempat tinggal/Status Hukum Tanah meliputi Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Kualitas Bangunan :

Lantai, adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah, seperti: keramik, marmer, papan, dan semen.

Luas Lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Sedangkan bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai.

Luas Lantai Per Kapita, adalah rasio luas rumah/bangunan tempat tinggal dibagi jumlah penghuni dalam meter persegi.

Atap, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah



tangga yang mendiaminya terlindung terutama dari terik matahari serta hujan.

Beton, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.

Genteng, adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar, termasuk genteng keramik, metal/logam, tanah liat atau fiber.

Asbes, adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen, umumnya atas asbes berbentuk gelombang.

Lainnya, meliputi kayu/sirap, seng, bambu, jerami, ijuk.

Dinding, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan lain.

Tembok, adalah dinding yang terbuat dari susunan batu merah atau batako, biasanya dilapisi plesteran semen.

Plesteran anyaman bambu/kawat, adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, diplester dengan campuran semen dan pasir.

Kayu, adalah dinding yang terbuat dari bagian pohon yang tua.

Batang Kayu, adalah dinding yang terbuat dari batang pohon yang masih utuh/bulat.

Anyaman Bambu, adalah bambu yang diiris tipis-tipis, dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

Lainnya, meliputi seng, kardus dan lain-lain.

Kloset, adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kaskus.

Kloset Leher Angsa, adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan, adalah jamban/kaskus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.



Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/ penampungan akhirnya.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)/SPAL, yaitu sebuah struktur yang dirancang secara terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota untuk membuang dan memisahkan limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan untuk keperluan lain.

Got/Selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan tinja/limbah/air hujan ke suatu tempat untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan.

Lubang tanah adalah liang atau lekukan di dalam tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Sanitasi Layak : Rumah tangga dikatakan memiliki sanitasi layak apabila rumah tangga (1) menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri, bersama atau komunal; (2) menggunakan jenis kloset yang berbentuk leher angsa; serta (3) tempat pembuangan akhir kotoran/tinja menggunakan tangki septik (*septic tank*) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah, khusus untuk daerah perdesaan termasuk juga tempat pembuangan akhir kotoran/tinja ke lubang tanah. Konsep sanitasi layak mengacu pada konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Sumber Air Minum

- **Air Kemasan Bermerk** adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan (galon, botol atau gelas).
- **Air Isi Ulang** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan biasanya tidak memiliki merk.
- **Air Leding** adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan



penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air.

- **Air Sumur Terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali serta dilindungi oleh tembok dan lantai semen.
- **Mata Air Terlindung** adalah sumber air dari permukaan tanah yang timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci atau lainnya.
- **Air Sumur/Mata Air Tak Terlindung** adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali atau air yang muncul dari permukaan tanah, tanpa ada perlindungan terhadap limbah.
- **Sumber Air Minum Layak** : Rumah tangga dikatakan menggunakan atau mempunyai akses air minum layak apabila sumber air minum yang digunakan rumah tangga berasal dari leding dan air terlindung (pompa/sumur bor, sumur terlindung, mata air terlindung). Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan bermerk atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep ini mengacu pada konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Listrik :

- **Listrik PLN Dengan Meteran** yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetric).
- **Listrik Tanpa Meteran** yaitu sumber penerangan listrik yang bersumber langsung dari tiang listrik, tidak melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.



- **Listrik PLN Non PLN** yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu/aki, generator dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
- **Sumber Penerangan Bukan Listrik** yaitu sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri dan lain-lain.

Rumah Layak Huni

Mengacu pada definisi global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat :
 - a. Bahan bangunan atap rumah terluas adalah beton, genteng, seng, kayu/sirap;
 - b. Bahan bangunan dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, batang kayu;
 - c. Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, semen/bata merah.
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai per kapita minimal 7,2 m².
3. Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (*access to improved water*).
4. Memiliki akses sanitasi layak (*access to adequate sanitation*).



BAB III

ULASAN

3.1 Penguasaan Tempat Tinggal

3.1.1 Keluarga yang Tinggal Dalam Bangunan Sensus

Keluarga adalah hubungan yang didasarkan atas ikatan perkawinan, baik yang saat ini statusnya masih kawin atau sudah bercerai. Keluarga bisa terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, ayah saja atau ibu saja. Dalam satu bangunan sensus atau dalam satu rumah biasanya dihuni oleh satu keluarga tetapi karena keterbatasan ekonomi atau hal-hal lain maka di dalam satu rumah bisa dihuni lebih dari satu keluarga.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 1 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Keluarga yang Tinggal di Dalam Bangunan Sensus/Rumah dan Rata-rata Keluarga di Dalam Bangunan Sensus, 2023

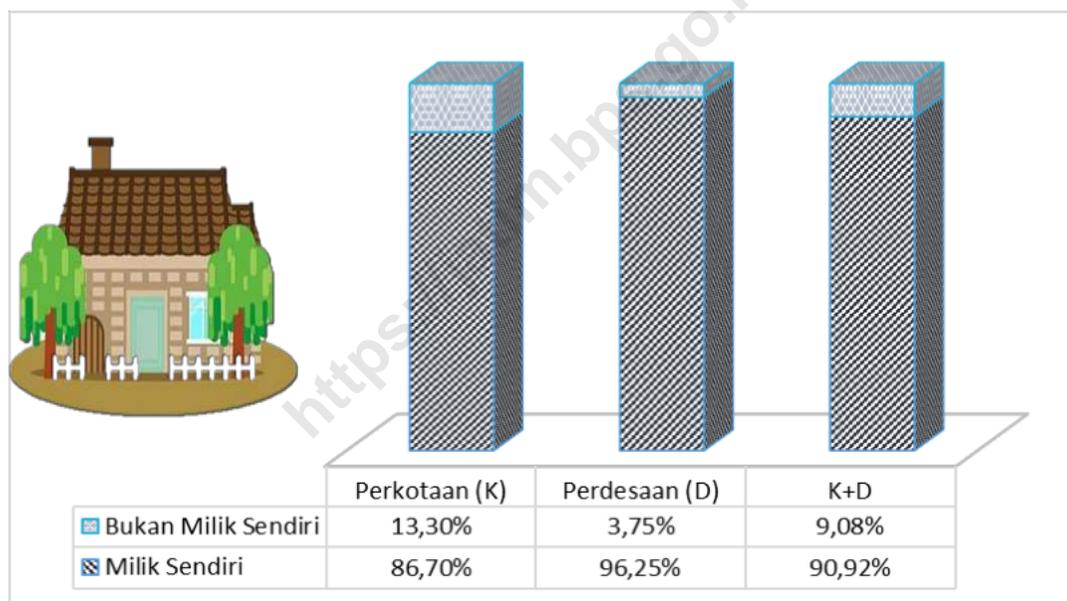
Berdasarkan data Susenas Maret 2023, diperoleh rata-rata jumlah keluarga yang tinggal dalam satu bangunan/rumah adalah satu keluarga. Terdapat sekitar



9.990 dari tiap 10.000 rumah tangga di Jawa Timur yang bangunan/rumahnya ditinggali sebanyak 1 hingga 3 keluarga. Sebaliknya, terdapat sekitar 10 dari tiap 10.000 rumah tangga yang bangunan/rumahnya dihuni 4 keluarga atau lebih.

3.1.2 Status Penguasaan Tempat Tinggal

Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan cenderung lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa. Persentase Rumah tangga berdasarkan status penguasaan tempat tinggal dapat dilihat pada Gambar 2. Pada gambar tersebut status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati dibagi menjadi dua yaitu bangunan milik sendiri dan bukan milik sendiri.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 2 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2023

Bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri terbagi atas kontrak/sewa, bebas sewa/dinas dan lainnya seperti rumah tangga yang tinggal di rumah adat. Status penguasaan milik sendiri diartikan bahwa tempat tinggal tersebut benar-benar dimiliki rumah tangga atau salah satu dari anggota rumah tangga. Dalam hal



ini termasuk juga dikatakan milik sendiri saat rumah tangga tersebut dalam penguasaan tempat tinggal menempati rumah yang dibeli secara angsuran/mencicil. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri di Jawa Timur sebesar 90,92 persen. Artinya dari setiap 100 rumah tangga di Jawa Timur, terdapat sekitar 90–91 diantaranya menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dan sekitar 9–10 sisanya menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri. Kebutuhan akan rumah cenderung menjadi permasalahan terutama di wilayah perkotaan. Perputaran aktivitas perekonomian yang lebih tinggi di perkotaan banyak membuat penduduk di desa bermigrasi ke perkotaan untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan akan rumah juga semakin tinggi. Keterbandingan antara jumlah penduduk yang tinggal di kota dengan lahan yang tersedia sebagai tempat tinggal merupakan salah satu fokus utama dalam masalah perumahan oleh pemerintah. Persentase rumah tangga di perkotaan yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang tinggal di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 86,70 persen berbanding 96,25 persen. Dari setiap 100 rumah tangga di perkotaan, terdapat sekitar 13–14 diantaranya yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri.

Kepemilikan bangunan berdasarkan status tempat tinggal biasanya dikaitkan dengan istilah *backlog*. Data *backlog* dalam perumahan bisa berdasarkan dari tingkat hunian dan kepemilikan bangunan tempat tinggal, jika data *backlog* yang digunakan bersumber dari BPS berarti data *backlog* tersebut dihitung berdasarkan kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan dari tingkat hunian. *Backlog* merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Renstra atau RPJMN di bidang perumahan. Indikator *backlog* biasanya digunakan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah penduduk yang ada di seluruh Indonesia.



Tabel 1 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Milik Sendiri		Bukan Milik Sendiri	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	99,01	98,49	0,99	1,51
2 Kab. Ponorogo	96,64	97,04	3,36	2,96
3 Kab. Trenggalek	97,27	95,58	2,73	4,42
4 Kab. Tulungagung	91,88	93,35	8,12	6,65
5 Kab. Blitar	94,03	94,77	5,97	5,23
6 Kab. Kediri	88,35	88,75	11,65	11,25
7 Kab. Malang	94,48	94,65	5,52	5,35
8 Kab. Lumajang	95,47	93,20	4,53	6,80
9 Kab. Jember	92,39	92,27	7,61	7,73
10 Kab. Banyuwangi	89,91	91,84	10,09	8,16
11 Kab. Bondowoso	91,13	94,57	8,87	5,43
12 Kab. Situbondo	94,74	93,28	5,26	6,72
13 Kab. Probolinggo	93,84	96,27	6,16	3,73
14 Kab. Pasuruan	96,07	95,52	3,93	4,48
15 Kab. Sidoarjo	87,59	87,08	12,41	12,92
16 Kab. Mojokerto	94,87	93,89	5,13	6,11
17 Kab. Jombang	90,30	90,73	9,70	9,27
18 Kab. Nganjuk	87,09	88,09	12,91	11,91
19 Kab. Madiun	92,04	92,68	7,96	7,32
20 Kab. Magetan	96,44	95,73	3,56	4,27
21 Kab. Ngawi	92,34	93,49	7,66	6,51
22 Kab. Bojonegoro	97,60	97,89	2,40	2,11
23 Kab. Tuban	95,53	93,28	4,47	6,72
24 Kab. Lamongan	96,38	96,52	3,62	3,48
25 Kab. Gresik	93,07	93,14	6,93	6,86
26 Kab. Bangkalan	95,90	96,51	4,10	3,49
27 Kab. Sampang	96,40	97,21	3,60	2,79
28 Kab. Pamekasan	97,60	96,68	2,40	3,32
29 Kab. Sumenep	98,11	97,13	1,89	2,87
71 Kota Kediri	76,17	76,14	23,83	23,86
72 Kota Blitar	76,93	79,16	23,07	20,84
73 Kota Malang	80,47	79,59	19,53	20,41
74 Kota Probolinggo	86,56	88,28	13,44	11,72
75 Kota Pasuruan	78,17	81,13	21,83	18,87
76 Kota Mojokerto	76,62	77,83	23,38	22,17
77 Kota Madiun	69,04	70,32	30,96	29,68
78 Kota Surabaya	67,51	64,63	32,49	35,37
79 Kota Batu	91,55	90,88	8,45	9,12
Jawa Timur	90,87	90,92	9,13	9,02

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023

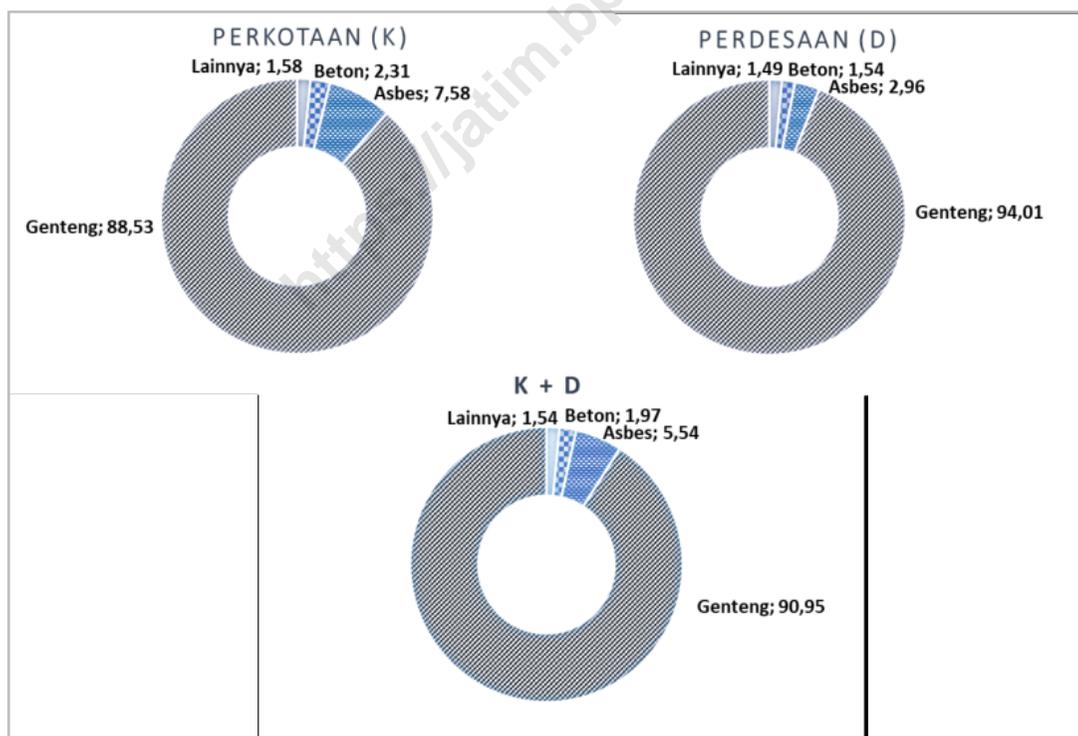
Jika dibandingkan tahun 2022, terjadi kenaikan persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri meskipun tidak terlalu



signifikan. Pada tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur, terlihat bahwa pada daerah berstatus “kota” kecuali Kota Batu, memiliki persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri di atas 10 persen. Bahkan di ibukota provinsi yaitu Kota Surabaya, terdapat sekitar 35-36 rumah tangga dari setiap 100 rumah tangga di kota tersebut yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri. Pada daerah berstatus “kabupaten”, terdapat tiga kabupaten yang memiliki persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Sidoarjo (12,92 persen), Kabupaten Nganjuk (11,91 persen), dan Kabupaten Kediri (11,25 persen).

3.2 Kondisi Fisik Bangunan

3.2.1 Penggunaan Atap Terlulus



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Maret 2023

Gambar 3 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Jenis Atap Terlulus, 2023



Penggunaan atap di Jawa Timur sangat bervariasi mulai dari genteng, beton, asbes, seng, bambu, kayu sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lain-lain. Meski demikian, genteng, asbes, dan beton merupakan tiga jenis atap yang paling banyak ditemui di Jawa Timur. Atap jenis genteng adalah yang terbanyak digunakan oleh rumah tangga dengan persentase sebesar 90,95 persen. Genteng yang digunakan di Jawa Timur biasanya terbuat dari keramik, metal, tanah liat tradisional maupun dari *fiber/polycarbonate*. Asbes juga banyak digunakan oleh rumah tangga dengan persentase sebesar 5,54 persen, sedangkan beton sekitar 1,97 persen, selebihnya menggunakan atap jenis lain sekitar 1,54 persen.

Persentase rumah tangga yang menggunakan atap genteng di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan, yaitu 94,01 persen berbanding 88,53 persen. Sebaliknya, persentase rumah tangga yang menggunakan atap asbes dan beton di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan. Dari setiap 100 rumah tangga yang tinggal di perkotaan, terdapat sekitar 9-10 diantaranya yang menggunakan atap terluas berupa asbes atau beton. Sementara itu, terdapat sekitar 4-5 dari setiap 100 rumah tangga di wilayah perdesaan yang menggunakan atap asbes atau beton pada tahun 2023.

Penggunaan atap biasanya terpengaruh dengan kondisi atau kebiasaan di masing-masing daerah. Untuk daerah yang memiliki cuaca panas biasanya menggunakan atap yang bisa mendinginkan dan sebaliknya. Wilayah seperti Kota Batu penggunaan atap beton lebih mendominasi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, dengan persentase sebesar 15,99 persen pada tahun 2023. Sementara itu, penggunaan atap asbes di Kota Surabaya lebih mendominasi dibandingkan kabupaten/kota lainnya dengan persentase sebesar 32,14 persen. Artinya, terdapat sekitar 32-33 dari tiap 100 rumah tangga di Kota Surabaya menggunakan asbes sebagai atap terluas tempat tinggalnya



Tabel 2 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Rumah/Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Beton		Genteng		Asbes		Lainnya	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kab. Pacitan	1,19	1,53	94,71	94,33	3,09	2,94	1,01	1,20
2 Kab. Ponorogo	1,72	1,12	95,40	97,12	1,74	1,36	1,13	0,40
3 Kab. Trenggalek	7,50	6,59	87,89	88,67	3,43	2,71	1,18	2,03
4 Kab. Tulungagung	1,44	1,16	95,00	96,28	3,16	2,12	0,41	0,44
5 Kab. Blitar	1,19	1,25	94,50	94,89	3,91	2,53	0,40	1,33
6 Kab. Kediri	1,90	1,15	92,70	94,08	3,75	3,43	1,64	1,34
7 Kab. Malang	4,43	3,75	84,16	90,04	9,10	4,09	2,31	2,12
8 Kab. Lumajang	1,57	1,24	92,86	94,15	3,17	3,16	2,39	1,45
9 Kab. Jember	0,97	0,21	97,67	98,41	1,02	0,88	0,35	0,50
10 Kab. Banyuwangi	0,31	0,86	94,07	95,25	4,41	2,90	1,22	0,99
11 Kab. Bondowoso	0,38	0,28	92,67	93,57	3,90	5,17	3,05	0,98
12 Kab. Situbondo	0,34	-	79,24	88,08	12,53	8,33	7,89	3,59
13 Kab. Probolinggo	0,78	0,56	92,01	94,85	5,03	2,91	2,18	1,68
14 Kab. Pasuruan	1,22	2,37	79,52	83,22	10,36	8,39	8,90	6,02
15 Kab. Sidoarjo	3,81	3,48	82,43	87,41	12,41	7,13	1,35	1,98
16 Kab. Mojokerto	1,50	1,03	93,31	94,22	4,73	3,83	0,47	0,92
17 Kab. Jombang	2,39	3,10	86,75	87,82	9,07	8,06	1,80	1,02
18 Kab. Nganjuk	2,39	1,77	94,29	94,49	2,70	2,71	0,62	1,03
19 Kab. Madiun	0,72	1,51	95,83	96,55	2,32	1,07	1,13	0,87
20 Kab. Magetan	2,09	1,42	95,41	97,32	1,39	0,93	1,11	0,33
21 Kab. Ngawi	1,15	1,25	95,99	97,45	1,89	0,45	0,97	0,85
22 Kab. Bojonegoro	1,97	0,76	96,13	96,40	0,80	1,35	1,10	1,49
23 Kab. Tuban	1,49	2,39	94,81	94,80	2,64	1,85	1,06	0,96
24 Kab. Lamongan	4,14	3,66	92,77	94,16	1,98	1,70	1,10	0,48
25 Kab. Gresik	6,44	4,78	84,96	85,81	7,19	7,93	1,41	1,48
26 Kab. Bangkalan	0,88	0,84	95,80	97,13	3,01	1,13	0,30	0,90
27 Kab. Sampang	0,31	0,47	97,57	98,41	1,65	0,27	0,47	0,85
28 Kab. Pamekasan	1,20	-	95,21	98,01	2,46	1,25	1,13	0,74
29 Kab. Sumenep	1,09	1,36	96,14	95,96	1,72	1,85	1,05	0,83
71 Kota Kediri	2,78	2,45	84,12	85,42	8,87	9,51	4,23	2,62
72 Kota Blitar	2,14	2,93	94,67	93,82	2,20	2,18	0,99	1,07
73 Kota Malang	5,74	3,27	73,71	83,59	14,40	8,89	6,15	4,25
74 Kota Probolinggo	-	0,12	93,57	96,61	6,15	2,99	0,28	0,28
75 Kota Pasuruan	2,92	1,99	90,51	94,93	5,03	2,21	1,54	0,87
76 Kota Mojokerto	0,87	1,31	85,76	84,55	10,93	9,58	2,44	4,56
77 Kota Madiun	1,57	1,84	94,34	90,83	3,47	5,40	0,63	1,93
78 Kota Surabaya	4,48	2,80	63,52	63,02	28,89	32,14	3,11	2,04
79 Kota Batu	14,62	15,99	76,71	76,58	5,25	3,18	3,42	4,25
Jawa Timur	2,37	1,97	88,88	90,95	6,79	5,54	1,96	1,54

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



3.2.2 Penggunaan Dinding Terluas

Dinding merupakan penyekat yang digunakan sebagai pembatas antar ruangan atau antar bangunan di samping kanan atau kiri. Dinding yang dicatatkan pada Susenas merupakan jenis dinding yang digunakan oleh rumah tangga. Apabila rumah tangga menggunakan dinding dengan dua jenis yang berbeda maka yang dicatatkan adalah dinding yang luasnya paling luas, dan jika memiliki luas yang sama maka dinding yang memiliki kode terkecil yang dicatat. Urutan dinding yang dipergunakan semakin kecil kode yang dimiliki merupakan dinding yang memiliki kualitas lebih baik.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 4 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2023



Jenis dinding yang digunakan sebagai pilihan adalah tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, anyaman bambu, batang kayu, bambu dan jenis lain seperti seng, kardus dan jenis yang belum didefinisikan diatas. Rumah tangga di Jawa Timur paling banyak menggunakan dinding tembok/plesteran anyaman bambu/kawat dengan persentase sebesar 91,17 persen. Artinya, terdapat sekitar 91–92 dari setiap 100 rumah tangga menggunakan jenis tembok sebagai dinding terluas bangunan yang ditempatinya. Rumah tangga dengan dinding rumah terbuat dari kayu/papan/batang kayu sebesar 6,54 persen. Pada rumah tangga di perdesaan, persentase rumah tangga dengan rumah menggunakan dinding tembok/plesteran anyaman bambu/kawat masih di bawah 90 persen seiring persentase rumah tangga yang rumahnya menggunakan dinding kayu/papan/batang kayu sebesar 11,18 persen. Dari setiap 100 rumah tangga di wilayah perdesaan, terdapat sekitar 11–12 diantaranya masih menggunakan dinding kayu/papan/batang kayu sebagai dinding terluas bangunan tempat tinggalnya.

Meskipun di Jawa Timur didominasi rumah tangga yang menggunakan dinding rumah berupa tembok/plesteran anyaman bambu-kawat, tapi masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki persentase dinding rumah berupa tembok/plesteran anyaman bambu-kawat dibawah 80 persen, yaitu Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Sampang. Bahkan terdapat dua kabupaten dengan persentase rumah tangga menggunakan dinding tembok/plesteran anyaman bambu-kawat belum mencapai 60 persen, yaitu Kabupaten Situbondo (58,92 persen) dan Kabupaten Bojonegoro (56,66 persen). Sebaliknya, terdapat sembilan kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga menggunakan dinding tembok/plesteran anyaman bambu-kawat mencapai diatas 99 persen, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Kota Batu.



Tabel 3 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2022 dan 2023

	Kabupaten/Kota	Tembok/plesteran/anyaman bambu-kawat		Kayu/papan/batang kayu		Bambu/anyaman bambu		Lainnya	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kab. Pacitan	91,81	92,94	5,70	4,68	1,05	1,09	1,44	1,29
2	Kab. Ponorogo	95,03	96,00	0,97	2,42	2,31	1,07	1,68	0,51
3	Kab. Trenggalek	93,85	94,78	2,70	2,39	1,68	1,67	1,77	1,16
4	Kab. Tulungagung	96,35	96,16	1,50	2,22	1,18	1,10	0,97	0,52
5	Kab. Blitar	95,96	95,69	3,53	3,87	0,51	0,44	-	-
6	Kab. Kediri	99,01	99,01	0,24	0,13	0,51	0,72	0,24	0,14
7	Kab. Malang	95,37	96,02	1,95	2,21	1,77	0,87	0,91	0,90
8	Kab. Lumajang	96,78	97,82	0,56	0,44	2,11	1,48	0,55	0,26
9	Kab. Jember	93,44	94,86	2,30	0,69	3,04	3,10	1,21	1,35
10	Kab. Banyuwangi	94,52	94,42	2,32	2,81	2,02	2,22	1,14	0,55
11	Kab. Bondowoso	76,86	77,01	12,03	13,26	7,57	7,30	3,54	2,43
12	Kab. Situbondo	59,54	58,92	33,17	34,08	3,99	4,80	3,30	2,20
13	Kab. Probolinggo	88,45	90,10	5,09	3,95	2,10	1,81	4,36	4,14
14	Kab. Pasuruan	94,38	95,86	3,66	3,23	1,19	0,29	0,77	0,62
15	Kab. Sidoarjo	99,57	99,36	0,06	0,63	0,30	0,01	0,07	-
16	Kab. Mojokerto	96,42	96,71	2,30	2,10	1,05	0,75	0,24	0,44
17	Kab. Jombang	93,81	95,31	4,87	4,04	1,32	0,38	-	0,27
18	Kab. Nganjuk	92,13	93,23	7,42	6,39	0,16	0,24	0,30	0,14
19	Kab. Madiun	87,44	90,44	11,87	8,44	0,25	0,27	0,44	0,85
20	Kab. Magetan	98,94	99,34	0,90	0,36	0,16	0,30	-	-
21	Kab. Ngawi	67,15	70,55	29,99	27,69	1,40	0,98	1,46	0,78
22	Kab. Bojonegoro	54,87	56,66	42,79	40,89	2,13	1,85	0,20	0,60
23	Kab. Tuban	79,76	80,35	18,76	17,76	1,19	1,07	0,28	0,82
24	Kab. Lamongan	83,96	85,94	14,07	12,58	1,37	1,14	0,61	0,34
25	Kab. Gresik	95,77	95,51	3,65	3,63	0,42	0,48	0,16	0,38
26	Kab. Bangkalan	76,09	80,77	18,90	12,09	2,71	4,45	2,30	2,69
27	Kab. Sampang	63,22	63,23	29,38	29,33	2,57	1,49	4,83	5,95
28	Kab. Pamekasan	88,82	89,46	1,96	1,63	4,14	5,10	5,09	3,81
29	Kab. Sumenep	93,96	93,80	3,65	4,09	1,53	1,44	0,86	0,67
71	Kota Kediri	99,22	99,32	0,29	0,50	0,48	0,18	-	0,00
72	Kota Blitar	99,58	99,37	0,42	0,41	-	-	-	0,22
73	Kota Malang	99,69	99,95	0,07	0,05	-	0,00	0,24	0,00
74	Kota Probolinggo	97,41	97,30	1,72	1,85	0,87	0,72	-	0,13
75	Kota Pasuruan	98,01	99,49	0,64	0,49	0,30	0,02	1,05	-
76	Kota Mojokerto	98,52	98,91	0,53	0,46	0,96	0,63	-	-
77	Kota Madiun	98,82	99,14	1,18	0,86	-	-	-	-
78	Kota Surabaya	97,86	98,51	1,45	0,97	0,15	0,18	0,54	0,34
79	Kota Batu	99,40	99,67	0,11	0,17	0,28	-	0,21	0,16
	Jawa Timur	90,31	91,17	7,08	6,54	1,53	1,37	1,07	0,92

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



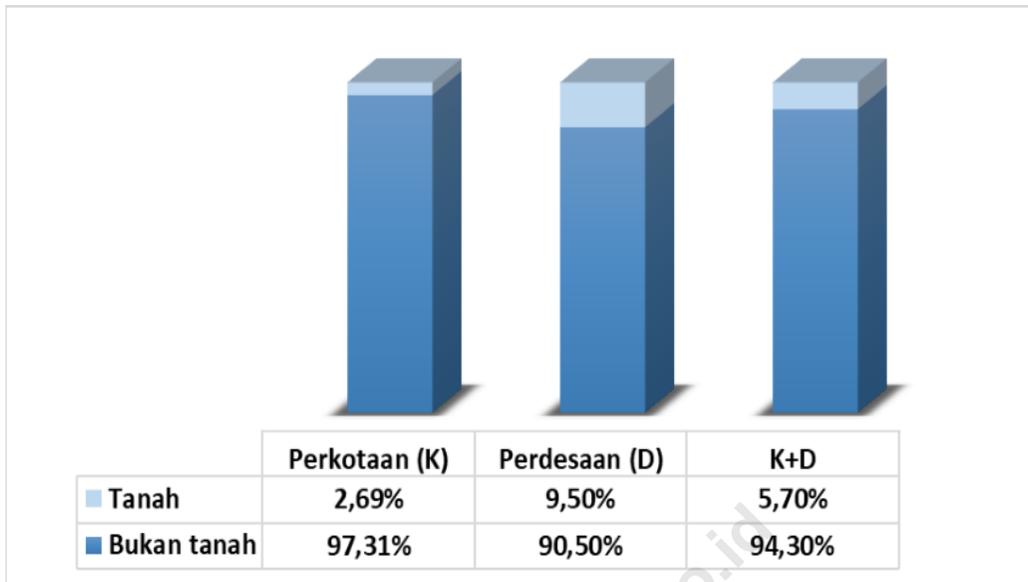
Penggunaan dinding dari kayu/papan/batang kayu banyak ditemui di Kabupaten Bojonegoro (40,89 persen), Kabupaten Situbondo (34,08 persen), Kabupaten Sampang sebesar (29,33 persen), dan Kabupaten Ngawi (27,69 persen). Kabupaten Bondowoso memiliki persentase rumah tangga dengan dinding rumah berupa bambu/anyaman bambu terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu terdapat sekitar 7-8 dari tiap 100 rumah tangga di kabupaten tersebut. Di Jawa Timur, juga masih ditemui rumah tangga yang menggunakan dinding jenis lainnya. Kabupaten Sampang (5,95 persen), Kabupaten Probolinggo (4,14 persen), dan Kabupaten Pamekasan (3,81 persen) merupakan tiga kabupaten yang memiliki persentase rumah tangga menggunakan dinding lainnya tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

3.2.3 Jenis Lantai Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas dari suatu ruangan. Ada yang terbuat dari marmer, keramik, granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah dan lainnya. Lantai juga digunakan sebagai salah satu variabel dari penyusunan indikator komposit rumah layak huni, baik itu dari jenis lantai terluas maupun dari luas lantai per kapita. Berdasarkan jenisnya, lantai dapat dibagi menjadi dua yaitu lantai tanah dan lantai bukan tanah.

Pada tahun 2023, dari setiap 100 rumah tangga di Jawa Timur, terdapat sekitar 94–95 rumah tangga yang menggunakan lantai bukan tanah dan 5–6 rumah tangga lainnya masih menggunakan lantai terluas berupa tanah. Persentase rumah tangga di perdesaan yang menggunakan lantai tanah lebih besar dibandingkan rumah tangga di perkotaan. Terdapat sekitar 9–10 dari setiap 100 rumah tangga di perdesaan yang masih menggunakan tanah sebagai lantai terluasnya. Sementara itu pada wilayah perkotaan, masih terdapat sekitar 2–3 dari tiap 100 rumah tangga di wilayah tersebut masih berlantaikan terluas berupa tanah.





Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 5 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2023

Dibandingkan tahun 2022, persentase rumah tangga yang memiliki lantai terluas berupa tanah pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 0,82 persen poin. Kabupaten yang masih banyak menggunakan lantai tanah adalah Kabupaten Bojonegoro (31,41 persen), Kabupaten Ngawi (24,03 persen), dan Kabupaten Sampang (20,01 persen). Selain ketiga kabupaten tersebut, masih terdapat beberapa kabupaten lainnya di Jawa Timur yang persentase rumah tangga berlantai terluas tanah masih di bawah 90 persen, yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bangkalan. Sebaliknya, terdapat sepuluh kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga dengan lantai terluas berupa tanah di atas 99 persen, yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.



Tabel 4 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Jenis Lantai Rumah/Bangunan Tempat Tinggal Terluas, 2022 dan 2023

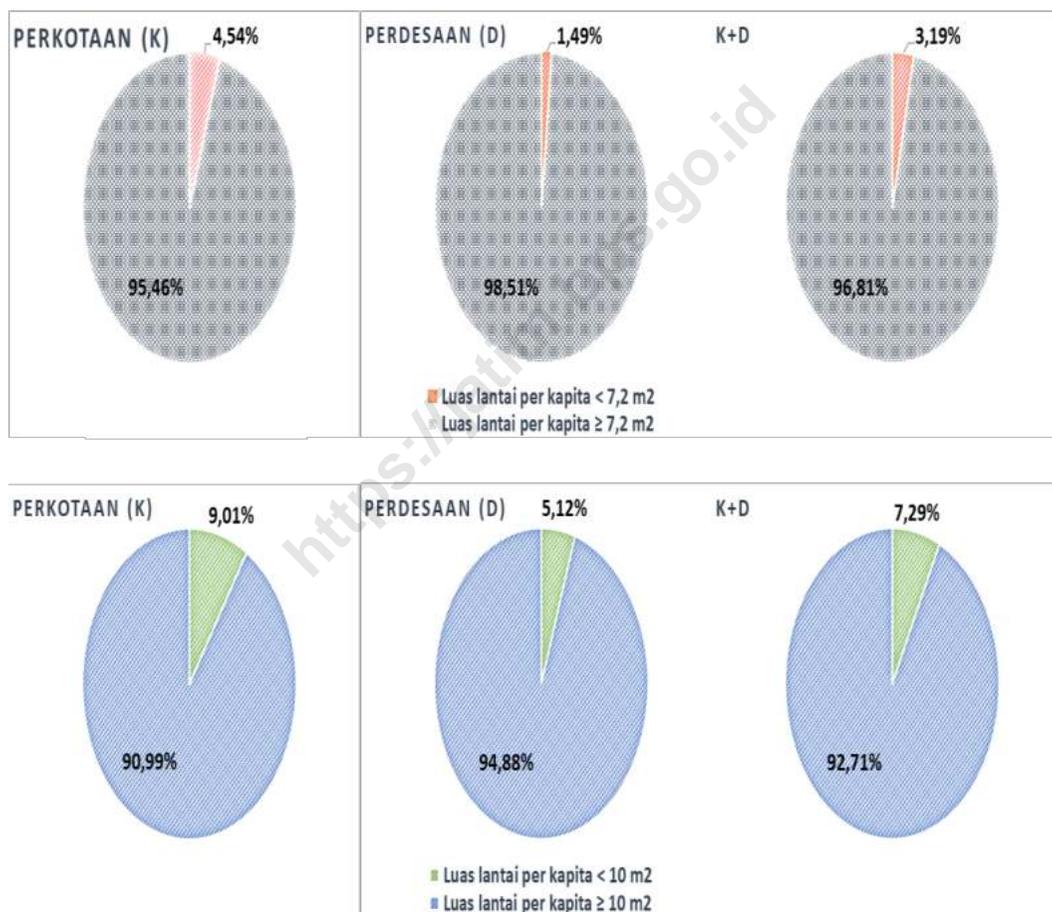
Kabupaten/Kota	Bukan tanah		Tanah	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kab. Pacitan	93,40	95,40	6,60	4,60
2 Kab. Ponorogo	93,08	93,59	6,92	6,41
3 Kab. Trenggalek	93,99	95,38	6,01	4,62
4 Kab. Tulungagung	97,66	98,06	2,34	1,94
5 Kab. Blitar	98,14	99,03	1,86	0,97
6 Kab. Kediri	97,60	98,00	2,40	2,00
7 Kab. Malang	97,62	98,60	2,38	1,40
8 Kab. Lumajang	98,29	98,33	1,71	1,67
9 Kab. Jember	95,24	96,00	4,76	4,00
10 Kab. Banyuwangi	97,01	96,89	2,99	3,11
11 Kab. Bondowoso	89,16	90,14	10,84	9,86
12 Kab. Situbondo	87,56	88,70	12,44	11,30
13 Kab. Probolinggo	88,46	90,92	11,54	9,08
14 Kab. Pasuruan	96,39	97,51	3,61	2,49
15 Kab. Sidoarjo	99,77	99,85	0,23	0,15
16 Kab. Mojokerto	96,17	97,05	3,83	2,95
17 Kab. Jombang	94,58	96,04	5,42	3,96
18 Kab. Nganjuk	88,60	91,96	11,40	8,04
19 Kab. Madiun	84,57	87,68	15,43	12,32
20 Kab. Magetan	97,53	98,61	2,47	1,39
21 Kab. Ngawi	73,69	75,97	26,31	24,03
22 Kab. Bojonegoro	67,61	68,59	32,39	31,41
23 Kab. Tuban	86,34	86,07	13,66	13,93
24 Kab. Lamongan	93,55	93,16	6,45	6,84
25 Kab. Gresik	98,02	99,00	1,98	1,00
26 Kab. Bangkalan	87,41	88,42	12,59	11,58
27 Kab. Sampang	78,55	79,99	21,45	20,01
28 Kab. Pamekasan	91,35	92,53	8,65	7,47
29 Kab. Sumenep	95,46	96,00	4,54	4,00
71 Kota Kediri	99,37	100,00	0,63	-
72 Kota Blitar	99,87	99,82	0,13	0,18
73 Kota Malang	98,91	99,47	1,09	0,53
74 Kota Probolinggo	99,43	99,44	0,57	0,56
75 Kota Pasuruan	98,95	99,64	1,05	0,36
76 Kota Mojokerto	98,78	99,71	1,22	0,29
77 Kota Madiun	98,65	98,37	1,35	1,63
78 Kota Surabaya	99,57	99,68	0,43	0,32
79 Kota Batu	98,69	98,76	1,31	1,24
Jawa Timur	93,48	94,30	6,52	5,70

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



3.2.4 Luas Lantai Per Kapita

Luas lantai rumah seringkali dianggap sebagai gambaran untuk melihat atau menilai kemampuan sosial dari rumah tangga. Selain itu luas lantai juga bisa digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Rumah tangga yang menempati luas lantai hunian yang sempit, maka akan mudah untuk terkena penularan penyakit. Penghitungan luas lantai perkapita mempergunakan perbandingan total luas lantai dengan jumlah anggota rumah tangga.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 6 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Luas Lantai Per Kapita, 2023



Sufficient living space adalah luas lantai hunian per kapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$. Indikator ini digunakan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan rumah layak huni, selain air minum layak, sanitasi layak, dan kualitas dari bangunan yang digunakan oleh rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki luas lantai hunian per kapita minimal $7,2 \text{ m}^2$ di Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 96,81 persen, selebihnya sebesar 3,19 persen rumah tangga tinggal dengan lantai hunian per kapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$. Persentase rumah tangga di perkotaan yang belum memenuhi *sufficient living space* lebih besar dibandingkan rumah tangga di perdesaan. Terdapat sekitar 4–5 dari setiap 100 rumah tangga di perkotaan memiliki luas lantai per kapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$. Sebaliknya di perdesaan, terdapat sekitar 1–2 dari setiap 100 rumah tangga di wilayah tersebut memiliki luas lantai per kapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$.

Selain batasan luas lantai per kapita minimal $7,2 \text{ m}^2$, batasan luas lantai per kapita yang sering digunakan adalah batasan minimal 10 m^2 menurut *American Public Health Association* (APHA). Persentase rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki luas lantai kurang dari 10 m^2 sebesar 7,29 persen atau terdapat sekitar 7–8 dari setiap 100 rumah tangga di Jawa Timur pada tahun 2023. Di wilayah perkotaan, terdapat 9,01 persen rumah tangga di wilayah tersebut memiliki luas lantai per kapita kurang dari 10 m^2 , lebih tinggi dibandingkan persentase di wilayah perdesaan sebesar 5,12 persen.

Kota Surabaya merupakan daerah yang memiliki persentase rumah tangga yang belum memenuhi *sufficient living space* terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 20,26 persen. Selain Kota Surabaya, terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga yang belum memenuhi *sufficient living space* di atas 5 persen pada tahun 2023, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Pasuruan.



Tabel 5 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Per Kapita, 2023

Kabupaten/Kota	Luas lantai per kapita	
	< 7,2 m ²	≥ 7,2 m ²
(1)	(2)	(3)
1 Kab. Pacitan	1,36	98,64
2 Kab. Ponorogo	0,75	99,25
3 Kab. Trenggalek	2,07	97,93
4 Kab. Tulungagung	1,41	98,59
5 Kab. Blitar	0,73	99,27
6 Kab. Kediri	1,94	98,06
7 Kab. Malang	1,36	98,64
8 Kab. Lumajang	0,51	99,49
9 Kab. Jember	2,64	97,36
10 Kab. Banyuwangi	0,30	99,70
11 Kab. Bondowoso	0,74	99,26
12 Kab. Situbondo	1,37	98,63
13 Kab. Probolinggo	2,06	97,94
14 Kab. Pasuruan	3,31	96,69
15 Kab. Sidoarjo	3,15	96,85
16 Kab. Mojokerto	1,88	98,12
17 Kab. Jombang	1,32	98,68
18 Kab. Nganjuk	1,27	98,73
19 Kab. Madiun	0,83	99,17
20 Kab. Magetan	0,16	99,84
21 Kab. Ngawi	0,15	99,85
22 Kab. Bojonegoro	0,92	99,08
23 Kab. Tuban	2,54	97,46
24 Kab. Lamongan	1,56	98,44
25 Kab. Gresik	3,74	96,26
26 Kab. Bangkalan	5,13	94,87
27 Kab. Sampang	0,25	99,75
28 Kab. Pamekasan	1,26	98,74
29 Kab. Sumenep	1,94	98,06
71 Kota Kediri	4,96	95,04
72 Kota Blitar	5,37	94,63
73 Kota Malang	6,16	93,84
74 Kota Probolinggo	4,51	95,49
75 Kota Pasuruan	8,66	91,34
76 Kota Mojokerto	3,89	96,11
77 Kota Madiun	2,74	97,26
78 Kota Surabaya	20,26	79,74
79 Kota Batu	2,87	97,13
Jawa Timur	3,19	96,81

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



3.3 Fasilitas yang Dimiliki oleh Rumah Tangga

3.3.1 Sumber Air Untuk Minum

Kebutuhan akan air menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi rumah tangga. Sumber air minum adalah sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Dalam pendataan Susenas, ditanyakan sumber penggunaan air untuk minum yang terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya air dalam kemasan bermerk/isi ulang, leding/pompa, sumur/mata air terlindung, sumur/mata air tak terlindung dan air permukaan/air hujan/lainnya. Apabila rumah tangga menggunakan air minum yang berasal dari beberapa sumber air, maka dipilih salah satu sumber air yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.

Tabel 6 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum dan Wilayah, 2023

Sumber air utama untuk minum	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)
Air dalam kemasan/isi ulang	46,41	22,25	35,75
Leding/sumur bor/pompa	32,82	33,48	33,11
Sumur/mata air terlindung	19,84	39,88	28,68
Sumur/mata air tak terlindung	0,74	3,76	2,07
Air permukaan/hujan/lainnya	0,19	0,63	0,39

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Air dalam kemasan/isi ulang menjadi sumber air minum yang menjadi pilihan terbanyak rumah tangga di Jawa Timur dengan persentase sebesar 35,75 persen di tahun 2023. Pilihan kedua untuk sumber air minum adalah air leding/sumur bor/pompa dengan persentase sebesar 33,11 persen diikuti sumur/mata air terlindung sebesar 28,68 persen. Besarnya persentase rumah tangga dengan sumber air minum berupa air kemasan/isi ulang disumbang oleh tingginya persentase rumah tangga dengan air minum berupa air dalam kemasan/isi ulang di wilayah perkotaan. Terdapat sekitar 46–47 dari tiap 100 rumah tangga di perkotaan



yang menggunakan air kemasan/isi ulang sebagai sumber air minum. Sementara itu, air sumur/mata air terlindung menjadi sumber air minum pilihan terbanyak rumah tangga di wilayah perdesaan. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 39–40 dari tiap 100 rumah tangga di wilayah perdesaan yang menggunakan air sumur/mata air terlindung sebagai sumber air minum. Baik di perkotaan maupun di perdesaan, masih ditemukan adanya rumah tangga yang memanfaatkan air sumur/mata air tidak terlindung dan air permukaan/hujan/lainnya sebagai sumber air minum. Bahkan di wilayah perdesaan, masih terdapat sekitar 3–4 dari tiap 100 rumah tangga yang menggunakan sumur/mata air tak terlindung sebagai sumber air minum.

Beberapa kabupaten/kota memiliki persentase rumah tangga menggunakan air dalam kemasan/isi ulang sebagai sumber air minum di atas 90 persen, yaitu Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Sementara itu, kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga dengan sumber air minum dari leding/sumur bor/pompa di atas 60 persen adalah Kabupaten Situbondo, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Magetan. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air minum di atas 50 persen terdapat pada Kota Batu (62,98 persen), Kabupaten Jember (57,76 persen), Kabupaten Blitar (57,16 persen), Kabupaten Lumajang (54,57 persen), Kabupaten Trenggalek (52,67 persen), Kabupaten Pacitan (52,13 persen), dan Kabupaten Malang (51,01 persen). Persentase terbesar rumah tangga dengan sumber air minum sumur/mata air tidak terlindung yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek dimana persentase rumah tangga penggunaannya di atas 10 persen. Persentase penggunaan air permukaan/hujan/lainnya sebagai sumber air minum terbesar terdapat pada Kabupaten Kediri, Kabupaten Sampang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Lamongan.



Tabel 7 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Minum, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama untuk Minum									
	Air dalam kemasan/isi ulang		Leding/sumur bor/pompa		Sumur/mata air terlindung		Sumur/mata air tak terlindung		Air permukaan/hujan/lainnya	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	8,22	7,66	13,95	21,12	62,24	52,13	15,11	17,09	0,48	2,00
2 Kab. Ponorogo	22,84	21,88	36,86	41,58	32,49	31,17	7,48	5,18	0,33	0,19
3 Kab. Trenggalek	10,55	15,06	15,39	18,04	55,29	52,67	18,77	14,23	-	-
4 Kab. Tulungagung	15,49	21,22	35,04	32,40	45,95	45,78	3,26	0,60	0,27	-
5 Kab. Blitar	10,31	9,04	32,13	30,37	54,50	57,16	3,06	3,43	-	-
6 Kab. Kediri	8,40	13,16	65,30	61,97	19,69	17,72	6,31	4,46	0,29	2,69
7 Kab. Malang	8,43	10,12	26,43	37,49	61,53	51,01	3,61	1,38	-	-
8 Kab. Lumajang	10,66	12,82	20,72	26,75	63,99	54,57	2,41	3,80	2,22	2,06
9 Kab. Jember	12,27	15,24	27,03	25,32	56,55	57,76	4,10	1,65	0,04	0,03
10 Kab. Banyuwangi	27,77	28,88	33,73	42,65	35,17	26,68	3,17	1,79	0,15	-
11 Kab. Bondowoso	4,03	4,84	42,09	42,00	47,26	47,59	5,28	4,97	1,34	0,60
12 Kab. Situbondo	3,99	5,07	71,59	65,65	23,65	26,73	0,78	2,55	-	-
13 Kab. Probolinggo	9,35	9,74	61,26	59,71	25,06	28,51	3,91	1,88	0,42	0,16
14 Kab. Pasuruan	14,45	17,36	39,98	40,31	43,05	40,41	2,38	1,08	0,14	0,84
15 Kab. Sidoarjo	74,32	73,01	12,53	7,05	12,50	19,64	0,59	0,30	0,06	-
16 Kab. Mojokerto	44,33	50,63	28,45	32,60	26,36	16,43	0,70	0,34	0,16	-
17 Kab. Jombang	49,98	52,73	40,45	36,33	8,71	9,61	0,86	1,33	-	-
18 Kab. Nganjuk	34,02	33,87	52,35	51,04	13,39	14,15	0,25	0,79	-	0,15
19 Kab. Madiun	20,69	25,19	44,75	50,49	29,73	22,61	3,60	1,71	1,23	-
20 Kab. Magetan	14,93	15,37	53,44	60,60	30,35	23,75	1,29	0,28	-	-
21 Kab. Ngawi	32,13	35,77	37,19	42,43	30,30	19,63	0,31	2,17	0,07	-
22 Kab. Bojonegoro	50,51	57,36	38,77	33,18	8,23	8,17	2,49	1,29	-	-
23 Kab. Tuban	60,80	68,22	31,60	23,84	7,14	7,32	0,46	0,45	-	0,17
24 Kab. Lamongan	82,70	87,89	6,06	5,37	6,88	3,71	1,59	1,06	2,77	1,97
25 Kab. Gresik	93,57	97,39	5,16	1,87	0,49	0,74	0,11	-	0,67	-
26 Kab. Bangkalan	19,34	21,06	35,29	34,68	41,69	41,10	2,76	3,16	0,91	-
27 Kab. Sampang	10,22	11,25	39,23	39,93	42,59	42,09	6,44	4,65	1,52	2,08
28 Kab. Pamekasan	4,86	8,82	52,19	43,31	38,20	46,36	4,64	1,17	0,12	0,34
29 Kab. Sumenep	11,13	7,13	45,04	43,60	39,51	47,74	3,98	0,96	0,33	0,57
71 Kota Kediri	33,95	36,43	62,67	62,49	3,15	0,70	0,12	0,38	0,11	-
72 Kota Blitar	30,20	29,21	48,56	36,30	21,23	33,73	-	0,76	-	-
73 Kota Malang	34,06	43,63	51,72	50,07	11,30	6,20	0,80	0,10	2,12	-
74 Kota Probolinggo	60,35	64,17	39,28	35,50	0,37	0,33	-	-	-	-
75 Kota Pasuruan	47,38	51,61	52,12	47,26	0,50	0,82	-	0,31	-	-
76 Kota Mojokerto	83,78	84,31	16,18	15,54	0,05	0,15	-	-	-	-
77 Kota Madiun	83,35	79,03	15,80	19,91	0,68	0,95	0,17	-	-	0,11
78 Kota Surabaya	92,89	96,01	6,31	3,99	0,44	-	0,30	-	0,06	-
79 Kota Batu	11,57	12,36	25,23	23,99	63,08	62,98	0,12	0,67	-	-
Jawa Timur	33,58	35,75	33,11	33,11	29,97	28,68	2,93	2,07	0,40	0,39

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



3.3.2 Sumber Air Untuk Mandi/Cuci/Dll

Kebutuhan air rumah tangga selain untuk air minum juga untuk mandi, mencuci, dll. Sumber air untuk mandi/cuci/dll terbagi atas air kemasan, leding/pompa, sumur/mata air terlindung, sumur/mata air tak terlindung dan air permukaan/air hujan/lainnya. Rumah tangga di Jawa Timur banyak menggunakan leding/sumur bor/pompa dan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air utama untuk mandi, mencuci dan lain-lain masing-masing sebesar 60,69 persen dan 32,70 persen. Sebagian kecil rumah tangga ada juga yang menggunakan air dalam kemasan/air isi ulang untuk mandi/cuci/dll yaitu sebesar 0,50 persen, sumur/mata air tidak terlindung sebesar 3,46 persen dan yang menggunakan air permukaan/hujan/lainnya sebesar 2,65 persen.

Tabel 8 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/Dll dan Wilayah, 2023

Sumber air utama untuk mandi/cuci/dll (1)	Perkotaan (K) (2)	Perdesaan (D) (3)	K + D (4)
Air dalam kemasan/isi ulang	0,63	0,33	0,50
Leding/sumur bor/pompa	71,20	47,38	60,69
Sumur/mata air terlindung	24,52	43,07	32,70
Sumur/mata air tak terlindung	1,88	5,47	3,46
Air permukaan/hujan/lainnya	1,77	3,75	2,65

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Di wilayah perkotaan Jawa Timur, persentase rumah tangga pengguna air leding/sumur bor/pompa untuk mandi/cuci/dll mencapai 71,20 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan persentase rumah tangga pengguna sumber air yang sama di wilayah perdesaan sebesar 47,38 persen. Rumah tangga di perdesaan pengguna air sumur/mata air terlindung untuk keperluan mandi/cuci/dll mencapai 43,07 persen, sedangkan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang menggunakan sumber air yang sama sebesar 24,52 persen.



Tabel 9 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/DII, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Sumber Air Utama untuk Mandi/Cuci/DII									
	Air dalam kemasan/isi ulang		Leding/sumur bor/pompa		Sumur/mata air terlindung		Sumur/mata air tak terlindung		Air permukaan/hujan/lainnya	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	-	-	16,70	23,46	65,64	56,36	15,36	18,18	2,30	2,00
2 Kab. Ponorogo	-	0,05	56,44	62,05	34,45	31,29	8,50	6,42	0,61	0,19
3 Kab. Trenggalek	-	0,12	22,30	28,66	56,66	54,49	20,97	15,08	0,07	1,65
4 Kab. Tulungagung	-	0,35	44,85	43,43	51,01	52,61	3,87	2,16	0,27	1,45
5 Kab. Blitar	-	-	37,30	33,90	57,69	61,95	5,00	4,15	-	-
6 Kab. Kediri	0,13	0,10	70,32	72,39	21,52	19,79	7,73	5,52	0,29	2,20
7 Kab. Malang	0,27	-	32,26	44,99	62,59	48,97	4,75	3,79	0,14	2,25
8 Kab. Lumajang	0,16	0,19	23,31	30,40	69,72	61,57	3,22	5,00	3,60	2,84
9 Kab. Jember	0,36	0,22	29,72	27,76	59,90	59,63	6,01	5,01	4,00	7,38
10 Kab. Banyuwangi	-	0,67	48,83	63,06	44,25	32,49	3,69	2,04	3,23	1,74
11 Kab. Bondowoso	-	-	38,90	41,49	43,38	45,65	5,95	6,20	11,77	6,66
12 Kab. Situbondo	-	-	72,73	66,12	25,07	27,26	0,94	4,05	1,26	2,57
13 Kab. Probolinggo	0,13	0,11	66,76	67,01	25,22	28,17	4,11	1,98	3,79	2,73
14 Kab. Pasuruan	0,18	0,91	48,00	51,32	46,84	43,11	4,62	2,81	0,36	1,85
15 Kab. Sidoarjo	3,15	1,55	72,30	69,74	22,76	25,94	1,41	2,57	0,39	0,20
16 Kab. Mojokerto	0,45	0,20	66,44	77,41	29,69	20,81	1,46	1,30	1,97	0,28
17 Kab. Jombang	0,56	0,27	84,76	84,06	13,44	13,93	1,22	1,74	0,01	-
18 Kab. Nganjuk	0,67	-	79,92	80,82	17,61	16,45	0,50	1,14	1,30	1,59
19 Kab. Madiun	0,10	0,09	62,23	69,60	31,47	23,67	4,58	4,12	1,62	2,52
20 Kab. Magetan	-	0,15	63,80	72,83	34,48	26,63	1,72	0,39	-	-
21 Kab. Ngawi	0,54	0,32	60,36	72,99	38,22	24,04	0,70	2,32	0,17	0,33
22 Kab. Bojonegoro	0,39	0,77	84,37	84,99	11,75	11,98	3,48	1,78	-	0,48
23 Kab. Tuban	1,31	1,56	84,92	75,94	12,40	18,01	1,14	2,72	0,23	1,77
24 Kab. Lamongan	1,23	1,18	47,55	52,94	28,71	25,84	4,77	4,19	17,74	15,85
25 Kab. Gresik	2,28	0,53	76,73	78,49	11,44	11,57	3,40	2,46	6,14	6,95
26 Kab. Bangkalan	0,07	0,36	46,00	45,83	41,41	47,04	5,93	4,73	6,60	2,04
27 Kab. Sampang	-	-	39,02	38,13	48,28	49,82	6,91	4,96	5,78	7,09
28 Kab. Pamekasan	-	-	54,47	44,87	39,39	47,93	5,44	3,87	0,70	3,33
29 Kab. Sumenep	0,41	0,35	52,46	46,89	39,79	44,25	5,63	3,93	1,72	4,58
71 Kota Kediri	-	-	94,18	99,21	5,26	0,39	0,45	0,39	0,11	0,01
72 Kota Blitar	0,45	-	71,08	53,66	27,99	44,39	0,39	1,71	0,09	0,24
73 Kota Malang	0,36	0,01	80,42	87,87	15,54	9,79	1,24	1,12	2,44	1,21
74 Kota Probolinggo	-	-	99,79	99,40	0,21	0,60	-	-	-	-
75 Kota Pasuruan	-	0,49	98,75	98,75	1,25	0,36	-	0,40	-	-
76 Kota Mojokerto	0,71	0,05	97,10	98,42	1,55	1,53	-	-	0,63	-
77 Kota Madiun	0,35	1,35	94,51	96,16	4,02	2,49	1,11	-	-	-
78 Kota Surabaya	3,35	1,99	88,11	92,42	7,74	5,31	0,61	-	0,19	0,28
79 Kota Batu	0,18	-	27,43	29,24	70,26	69,09	2,12	1,67	-	-
Jawa Timur	0,72	0,50	58,38	60,69	34,60	32,70	4,04	3,46	2,25	2,65

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



Kabupaten/kota yang paling banyak menggunakan leding/sumur bor/pompa untuk mandi/cuci/dll dengan persentase rumah tangga pengguna mencapai di atas 90 persen adalah Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Surabaya. Sementara itu, Kota Batu, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Blitar merupakan kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga pengguna air sumur/mata air terlindung untuk mandi/cuci/dll di atas 60 persen. Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten dengan persentase pengguna air sumur/mata air tidak terlindung untuk mandi/cuci/dll mencapai di atas 10 persen. Selain itu, Kabupaten Lamongan merupakan satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga pengguna air permukaan/sungai/lainnya untuk mandi/cuci/dll mencapai di atas 10 persen, atau dalam hal ini sebesar 15,85 persen pada tahun 2023.

3.3.3 Jarak Sumber Air Minum dan Sumber Air Mandi/Cuci/Dll ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran

Jarak sumur dengan tempat penampungan akhir kotoran menentukan kondisi kesehatan dari anggota rumah tangga. Standar jarak dari tempat penampungan akhir kotoran (*septic tank*) ke sumur air bersih yang ditentukan oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah 10 meter. Kenyataan di masyarakat sangatlah bertolak belakang, karena masih banyak ditemukan jarak antara sumber air minum dan tempat penampungan kotoran kurang dari 10 meter. Dari sisi kesehatan jarak yang dekat tersebut sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat, karena jarak yang dekat bisa menyebabkan air minum tercemar, tidak hanya bakteri *Escherichia Coli* tapi juga zat kimia berbahaya yang dapat mencemari air. Alasan yang menyebabkan jarak dekat tersebut salah satunya adalah wilayah padat penduduk seperti di perkotaan.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran terdekat tidak hanya dilihat dari tempat penampungan di rumah yang ditempati rumah tangga tetapi juga dilihat dari tempat penampungan di rumah tetangga. Jika tempat



penampungan limbah/kotoran milik tetangga lebih dekat dengan sumber air minum rumah tangga maka yang dihitung jarak terdekat adalah jarak tersebut. Pertanyaan jarak sumber air utama ke tempat penampungan limbah terdekat ditanyakan hanya untuk sumber air utama berupa sumur bor/pompa, sumur atau mata air baik terlindung maupun tidak terlindung.

Tabel 10 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Jarak Sumber Air Utama Untuk Minum dan Mandi/Cuci/Dll ke Tempat Penampungan Kotoran/Limbah Terdekat, 2023

Sumber air utama (1)	Jarak ke tempat penampungan kotoran/limbah		
	< 10 m (2)	≥10 m (3)	Tidak tahu (4)
Untuk minum	27,65	68,38	3,97
Untuk mandi/cuci/dll	28,76	67,64	3,60

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki jarak sumber air utama untuk minum dari penampungan kotoran/limbah terdekat minimal 10 meter sebesar 68,38 persen, sedangkan yang kurang dari 10 meter sebesar 27,65 persen, selebihnya menjawab tidak tahu (3,97 persen). Pencatatan jarak dari sumber air untuk mandi/cuci/dll dengan tempat penampungan akhir kotoran tidak berbeda dengan jarak pada sumber air minum. Persentase yang memiliki jarak sumber air untuk mandi/cuci/dll lebih dari atau sama dengan 10 meter di tahun 2023 sebesar 67,64 persen, sedangkan yang kurang dari 10 meter sebesar 28,76 persen, selebihnya menjawab tidak tahu (3,60 persen).



Tabel 11 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Utama Untuk Minum ke Tempat Penampungan Kotoran/Limbah Terdekat, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Jarak sumber air minum (pompa,sumur,mata air) ke tempat penampungan kotoran/limbah					
	< 10 m		≥ 10 m		Tidak Tahu	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	26,16	13,33	73,69	85,38	0,15	1,29
2 Kab. Ponorogo	13,20	15,05	85,58	83,17	1,22	1,78
3 Kab. Trenggalek	27,47	29,71	72,12	67,80	0,41	2,49
4 Kab. Tulungagung	35,56	30,62	62,69	67,08	1,75	2,30
5 Kab. Blitar	23,25	15,73	76,03	82,57	0,72	1,70
6 Kab. Kediri	38,58	24,76	59,91	68,87	1,51	6,37
7 Kab. Malang	34,29	32,46	63,72	64,60	1,99	2,94
8 Kab. Lumajang	38,90	36,27	56,21	59,81	4,88	3,92
9 Kab. Jember	28,70	34,24	68,07	61,62	3,22	4,14
10 Kab. Banyuwangi	29,52	22,55	63,40	73,60	7,08	3,85
11 Kab. Bondowoso	32,27	31,42	59,71	62,54	8,02	6,04
12 Kab. Situbondo	45,43	40,42	54,26	58,12	0,31	1,46
13 Kab. Probolinggo	53,41	38,56	44,41	57,23	2,18	4,21
14 Kab. Pasuruan	33,33	27,15	64,50	70,57	2,17	2,28
15 Kab. Sidoarjo	27,77	22,88	59,80	48,66	12,42	28,46
16 Kab. Mojokerto	33,99	28,53	63,83	71,33	2,18	0,14
17 Kab. Jombang	48,72	31,80	48,88	65,66	2,40	2,54
18 Kab. Nganjuk	45,63	41,80	50,64	55,22	3,73	2,98
19 Kab. Madiun	34,74	28,35	62,26	66,94	3,00	4,71
20 Kab. Magetan	36,75	35,81	60,55	63,99	2,69	0,20
21 Kab. Ngawi	31,63	23,23	67,56	76,00	0,81	0,77
22 Kab. Bojonegoro	28,25	24,37	69,99	74,99	1,77	0,64
23 Kab. Tuban	23,52	22,07	72,23	76,39	4,25	1,54
24 Kab. Lamongan	33,36	20,58	62,29	76,43	4,34	2,99
25 Kab. Gresik	11,73	33,69	69,28	66,31	18,99	0,00
26 Kab. Bangkalan	36,98	33,03	59,33	54,54	3,68	12,43
27 Kab. Sampang	12,25	8,31	87,75	91,60	-	0,09
28 Kab. Pamekasan	8,25	11,11	88,52	88,89	3,24	0,00
29 Kab. Sumenep	22,31	15,45	73,59	76,50	4,10	8,05
71 Kota Kediri	63,66	64,79	34,64	33,84	1,71	1,37
72 Kota Blitar	50,48	39,58	47,66	60,42	1,86	0,00
73 Kota Malang	59,73	44,39	35,60	51,47	4,67	4,14
74 Kota Probolinggo	21,51	28,86	77,96	69,08	0,54	2,06
75 Kota Pasuruan	43,99	39,89	56,01	56,92	-	3,19
76 Kota Mojokerto	44,26	57,09	51,15	33,59	4,59	9,32
77 Kota Madiun	21,54	13,90	73,13	83,09	5,33	3,01
78 Kota Surabaya	55,59	-	14,87	-	29,53	-
79 Kota Batu	22,52	25,75	69,29	70,00	8,19	4,25
Jawa Timur	32,16	27,65	64,87	68,38	2,97	3,97

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



Tabel 12 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jarak Sumber Air Utama Untuk Mandi/Cuci/Dll ke Tempat Penampungan Kotoran/Limbah Terdekat, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Jarak sumber air mandi/cuci/dll (pompa,sumur,mata air) ke tempat penampungan kotoran/limbah					
	< 10 m		≥ 10 m		Tidak tahu	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	29,30	13,60	70,56	85,04	0,14	1,36
2 Kab. Ponorogo	15,35	13,35	83,61	85,30	1,04	1,35
3 Kab. Trenggalek	26,73	28,00	72,43	69,81	0,85	2,19
4 Kab. Tulungagung	35,06	34,53	63,35	63,07	1,59	2,40
5 Kab. Blitar	24,48	15,79	74,88	82,60	0,64	1,61
6 Kab. Kediri	39,15	25,46	59,39	68,89	1,45	5,65
7 Kab. Malang	33,46	30,44	64,44	66,51	2,10	3,05
8 Kab. Lumajang	40,86	39,95	54,90	56,49	4,24	3,56
9 Kab. Jember	30,28	36,53	67,27	61,43	2,46	2,04
10 Kab. Banyuwangi	30,28	25,18	64,27	71,36	5,45	3,46
11 Kab. Bondowoso	34,21	29,44	57,99	64,57	7,80	5,99
12 Kab. Situbondo	47,25	40,76	52,44	57,98	0,30	1,26
13 Kab. Probolinggo	53,51	37,30	44,33	59,08	2,17	3,62
14 Kab. Pasuruan	35,23	28,36	62,39	69,47	2,38	2,17
15 Kab. Sidoarjo	37,92	36,26	54,22	56,07	7,86	7,67
16 Kab. Mojokerto	29,46	26,39	66,25	72,95	4,29	0,66
17 Kab. Jombang	49,13	37,91	47,58	61,00	3,29	1,09
18 Kab. Nganjuk	44,09	35,98	53,00	61,93	2,91	2,09
19 Kab. Madiun	31,08	26,74	67,10	69,99	1,63	3,27
20 Kab. Magetan	37,05	33,65	60,38	65,88	2,57	0,47
21 Kab. Ngawi	35,80	20,58	63,35	75,62	0,86	3,80
22 Kab. Bojonegoro	28,35	21,44	70,82	78,12	0,81	0,44
23 Kab. Tuban	27,25	23,94	68,52	73,79	4,23	2,27
24 Kab. Lamongan	25,62	26,44	67,96	66,46	6,42	7,10
25 Kab. Gresik	31,78	25,52	56,60	68,00	11,42	6,48
26 Kab. Bangkalan	37,01	31,71	56,40	57,31	6,60	10,98
27 Kab. Sampang	13,17	10,66	86,83	89,02	-	0,32
28 Kab. Pamekasan	8,88	11,81	89,26	88,19	2,86	0,00
29 Kab. Sumenep	22,64	15,20	72,46	76,63	4,90	8,17
71 Kota Kediri	62,44	62,60	35,19	35,65	2,38	1,75
72 Kota Blitar	45,51	38,24	51,91	60,70	2,57	1,06
73 Kota Malang	57,45	42,41	35,84	52,88	6,71	4,71
74 Kota Probolinggo	30,07	32,57	67,93	65,43	2,00	2,00
75 Kota Pasuruan	33,89	37,70	53,44	60,78	1,68	1,52
76 Kota Mojokerto	50,76	53,32	40,88	40,31	8,35	6,37
77 Kota Madiun	35,74	32,53	60,84	62,71	3,62	4,76
78 Kota Surabaya	51,20	44,16	37,54	36,30	11,26	19,54
79 Kota Batu	25,01	23,71	66,91	71,44	8,08	4,85
Jawa Timur	33,59	28,76	62,90	67,64	3,51	3,60

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga yang memiliki jarak sumber air utama untuk minum dari penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 meter mencapai di atas 50 persen pada tahun 2023, yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto. Dua kabupaten/kota tersebut juga memiliki persentase rumah tangga yang memiliki jarak sumber air utama untuk mandi/cuci/dll dari penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 meter mencapai di atas 50 persen.

3.3.4 Bahan Bakar Untuk Memasak

Penggunaan bahan bakar tidak terlepas dari kegiatan memasak di rumah tangga. Pada Susenas Maret 2023 penggunaan bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak meliputi listrik, gas, elpiji, gas kota, biogas, minyak tanah, arang, briket, kayu bakar, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat pilihan bagi rumah tangga yang tidak memasak.

Tabel 13 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak dan Wilayah, 2023

Bahan bakar utama	Perkotaan (K)	Perdesaan (D)	K + D
(1)	(2)	(3)	(4)
Listrik	0,31	0,30	0,31
Gas/elpiji/gas kota/biogas	94,06	79,57	87,66
Minyak tanah	0,19	0,03	0,12
Arang/briket/kayu bakar	4,93	19,84	11,51
Lainnya	0,04	0,03	0,04
Tidak memasak	0,47	0,23	0,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gas/elpiji/gas kota/biogas merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Jawa Timur dengan persentase sebesar 87,66 persen diikuti oleh jenis bahan bakar arang/briket/kayu bakar yang digunakan oleh



11,51 persen rumah tangga. Selebihnya, ada yang menggunakan listrik (0,33 persen), minyak tanah (0,12 persen), dan lainnya (0,04 persen). Pada tahun 2023, masih terdapat rumah tangga yang tidak memasak dengan persentase sebesar 0,36 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar gas/elpiji/gas kota/biogas di perkotaan di atas 90 persen, lebih besar dibandingkan persentase rumah tangga di perdesaan. Sebaliknya, persentase rumah tangga pengguna arang/briket/kayu bakar di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan di perkotaan. Di perdesaan, terdapat sekitar 19-20 dari tiap 100 rumah tangganya menggunakan arang/briket/kayu bahan sebagai bahan bakar utama memasak.

Kabupaten Pacitan merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang memiliki persentase rumah tangga pengguna bahan bakar gas/elpiji/gas kota/biogas kurang dari 50 persen pada tahun 2023. Kebanyakan rumah tangga di Kabupaten Pacitan menggunakan arang/briket/kayu bakar sebagai bahan bakar memasak. Meski demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota selain Kabupaten Pacitan yang persentase pengguna bahan bakar gas/elpiji/gas kota/biogasnya masih dibawah 80 persen, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo. Sebaliknya, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki persentase pengguna bahan bakar gas/elpiji/gas kota/biogasnya di atas 99 persen, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Kota Surabaya merupakan kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga pengguna minyak tanah paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, yaitu sebesar 1,04 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang tidak memasak tertinggi adalah Kota Blitar sebesar 3,25 persen pada tahun 2023.



Tabel 14 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bahan Bakar Utama yang Digunakan Untuk Memasak, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Bahan Bakar Utama											
	Listrik		Gas/elpiji/gas kota/biogas		Minyak tanah		Arang/ briket/ kayu bakar		Lainnya		Tidak memasak	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kab. Pacitan	0,32	0,94	42,46	31,84	-	0,16	57,15	66,59	-	-	0,06	0,47
2 Kab. Ponorogo	0,18	0,30	66,80	71,89	-	-	32,80	27,33	-	-	0,23	0,48
3 Kab. Trenggalek	0,73	0,34	61,62	58,76	-	-	37,37	40,26	0,04	0,10	0,23	0,54
4 Kab. Tulungagung	0,79	0,34	85,70	84,74	-	-	13,44	14,36	-	-	0,06	0,56
5 Kab. Blitar	2,70	0,07	80,24	76,65	-	-	17,06	23,04	-	-	-	0,24
6 Kab. Kediri	0,38	-	92,89	93,31	0,18	-	6,39	6,35	-	-	0,17	0,34
7 Kab. Malang	-	0,17	90,64	88,70	0,05	-	9,06	10,95	-	-	0,25	0,18
8 Kab. Lumajang	0,87	0,73	84,64	74,63	-	0,10	14,12	23,81	-	-	0,36	0,73
9 Kab. Jember	0,13	-	80,90	79,56	-	-	18,57	20,11	0,12	0,16	0,28	0,17
10 Kab. Banyuwangi	0,07	0,30	92,11	89,71	0,05	0,08	7,44	9,62	-	-	0,33	0,29
11 Kab. Bondowoso	0,08	-	73,64	69,76	-	0,29	26,21	29,77	-	-	0,07	0,18
12 Kab. Situbondo	0,23	-	80,83	82,28	0,05	-	18,13	17,66	-	-	0,77	0,06
13 Kab. Probolinggo	0,63	0,11	65,45	71,35	-	-	33,79	28,43	-	-	0,13	0,11
14 Kab. Pasuruan	0,68	0,33	89,48	90,45	-	-	9,16	9,14	0,19	0,08	0,49	-
15 Kab. Sidoarjo	0,79	0,24	97,70	99,29	0,25	0,06	-	-	0,64	-	0,63	0,41
16 Kab. Mojokerto	1,07	0,39	96,71	98,33	-	-	1,68	0,87	0,09	-	0,45	0,41
17 Kab. Jombang	0,36	0,21	98,33	98,09	0,09	0,13	0,85	1,07	-	0,10	0,37	0,40
18 Kab. Nganjuk	0,08	0,25	91,66	92,24	-	-	7,82	7,12	0,11	-	0,34	0,39
19 Kab. Madiun	0,40	0,28	79,98	81,77	-	-	19,52	17,10	-	0,19	0,11	0,66
20 Kab. Magetan	0,11	-	93,84	91,82	0,19	-	5,35	7,46	-	0,19	0,50	0,53
21 Kab. Ngawi	0,16	0,04	82,79	82,45	-	-	16,45	17,21	-	-	0,60	0,30
22 Kab. Bojonegoro	0,34	0,25	89,34	91,54	-	-	10,04	7,85	-	-	0,28	0,36
23 Kab. Tuban	0,17	0,06	94,95	92,41	0,04	0,31	4,69	6,84	-	0,11	0,15	0,27
24 Kab. Lamongan	1,06	0,17	96,41	96,68	0,14	0,26	1,82	2,07	-	0,11	0,57	0,71
25 Kab. Gresik	0,19	-	97,92	99,43	0,26	-	0,61	0,28	-	-	1,03	0,29
26 Kab. Bangkalan	0,67	1,90	89,59	86,54	0,20	-	9,42	11,29	-	-	0,10	0,27
27 Kab. Sampang	0,17	-	89,06	89,81	-	-	10,72	10,19	-	-	0,05	-
28 Kab. Pamekasan	-	-	93,38	93,50	-	-	6,54	6,50	-	-	0,08	-
29 Kab. Sumenep	2,12	2,13	91,09	88,83	-	-	6,12	8,44	0,21	0,02	0,46	0,58
71 Kota Kediri	0,14	0,03	97,79	99,02	0,63	0,23	0,75	0,56	-	-	0,68	0,16
72 Kota Blitar	0,15	0,04	95,83	92,82	-	-	2,75	3,89	-	-	1,27	3,25
73 Kota Malang	0,23	0,67	98,45	98,47	0,20	0,26	0,15	-	-	-	0,97	0,60
74 Kota Probolinggo	-	-	96,14	97,62	0,07	0,07	3,67	2,08	-	-	0,12	0,23
75 Kota Pasuruan	0,14	-	97,81	99,48	0,52	-	-	0,07	-	-	1,53	0,45
76 Kota Mojokerto	-	0,52	96,94	98,31	0,49	0,41	-	-	-	-	2,56	0,76
77 Kota Madiun	0,55	-	97,37	97,68	0,71	0,72	0,96	0,64	-	-	0,41	0,96
78 Kota Surabaya	1,27	0,38	96,58	97,97	1,08	1,04	-	-	0,03	0,06	1,06	0,55
79 Kota Batu	0,07	-	99,23	99,84	-	-	0,40	0,16	-	-	0,30	-
Jawa Timur	0,55	0,31	88,37	87,66	0,14	0,12	10,45	11,51	0,07	0,04	0,42	0,36

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



3.3.5 Sumber Penerangan

Elektrifikasi di suatu daerah ditandai dengan penggunaan listrik sebagai sumber penerangan baik listrik PLN maupun listrik non PLN. Pada tahun 2023, nyaris 100 persen rumah tangga di Jawa Timur menggunakan listrik sebagai bahan penerangan. Hanya 0,02 persen rumah tangga yang masih menggunakan penerangan bukan listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lain-lain. Penggunaan sumber penerangan yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, dari persentase sebesar 99,59 persen di tahun 2022 menjadi 99,63 persen di tahun 2023.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 7 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Penggunaan Sumber Utama Penerangan, 2023

Meskipun penggunaan listrik PLN sebagai sumber penerangan sudah mendominasi di semua kabupaten/kota di Jawa Timur, masih terdapat satu kabupaten yang persentase rumah tangga pengguna listrik PLN-nya masih di bawah 99 persen yaitu Kabupaten Sumenep. Sekitar 9–10 dari setiap 100 rumah tangga di Kabupaten Sumenep menggunakan penerangan Listrik Non PLN. Selain itu, masih ditemukan rumah tangga dengan sumber penerangan bukan listrik di enam kabupaten meskipun persentasenya relatif sangat kecil.



Tabel 15 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Sumber Utama Penerangan, 2022 dan 2023

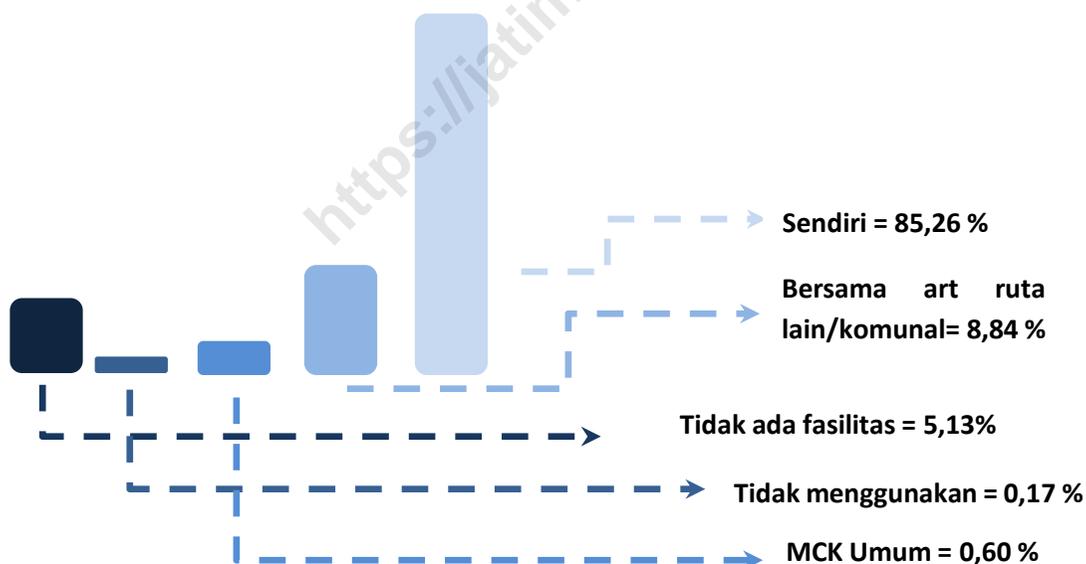
Kabupaten/Kota	Sumber utama penerangan					
	Listrik PLN		Listrik Non PLN		Lainnya	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	99,86	99,88	0,09	-	0,06	0,12
2 Kab. Ponorogo	99,78	100,00	-	-	0,22	-
3 Kab. Trenggalek	99,84	99,60	0,16	0,40	-	-
4 Kab. Tulungagung	99,95	99,76	-	0,24	0,05	-
5 Kab. Blitar	99,95	100,00	0,05	-	-	-
6 Kab. Kediri	100,00	100,00	-	-	-	-
7 Kab. Malang	100,00	99,88	-	0,12	-	-
8 Kab. Lumajang	99,77	99,43	0,18	0,42	0,05	0,15
9 Kab. Jember	99,85	99,90	0,15	0,08	-	0,02
10 Kab. Banyuwangi	99,79	100,00	0,21	-	-	-
11 Kab. Bondowoso	99,93	100,00	0,07	-	-	-
12 Kab. Situbondo	99,55	100,00	0,45	-	-	-
13 Kab. Probolinggo	98,69	99,51	1,31	0,49	-	-
14 Kab. Pasuruan	99,44	99,88	0,56	0,12	-	-
15 Kab. Sidoarjo	99,90	100,00	0,10	0,00	-	-
16 Kab. Mojokerto	100,00	99,84	-	0,13	-	0,03
17 Kab. Jombang	99,93	100,00	0,07	-	-	-
18 Kab. Nganjuk	100,00	99,95	-	0,05	-	-
19 Kab. Madiun	99,87	99,93	0,10	-	0,04	0,07
20 Kab. Magetan	100,00	100,00	-	-	-	-
21 Kab. Ngawi	100,00	100,00	-	-	-	-
22 Kab. Bojonegoro	99,68	100,00	0,32	-	-	-
23 Kab. Tuban	100,00	100,00	-	-	-	-
24 Kab. Lamongan	99,71	100,00	0,18	-	0,11	-
25 Kab. Gresik	99,87	100,00	0,13	-	-	-
26 Kab. Bangkalan	99,76	99,93	0,24	0,07	-	-
27 Kab. Sampang	99,91	100,00	0,09	-	-	-
28 Kab. Pamekasan	99,63	100,00	0,37	-	-	-
29 Kab. Sumenep	91,77	90,30	7,77	9,45	0,46	0,25
71 Kota Kediri	100,00	100,00	-	-	-	-
72 Kota Blitar	100,00	100,00	-	-	-	-
73 Kota Malang	100,00	100,00	-	-	-	-
74 Kota Probolinggo	99,93	100,00	0,07	-	-	-
75 Kota Pasuruan	100,00	100,00	-	-	-	-
76 Kota Mojokerto	100,00	100,00	-	-	-	-
77 Kota Madiun	99,74	100,00	0,26	-	-	-
78 Kota Surabaya	99,82	100,00	0,18	-	-	-
79 Kota Batu	99,96	100,00	0,04	-	-	-
Jawa Timur	99,59	99,63	0,39	0,35	0,02	0,02

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



3.3.6 Fasilitas BAB (Buang Air Besar)

Kepemilikan fasilitas buang air besar merupakan ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga dan dirinci menjadi memiliki fasilitas buang air besar dan tidak memiliki fasilitas buang air besar. Rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar terbagi lagi menurut penggunaannya, diantaranya adalah tersedia fasilitas BAB dan digunakan untuk anggota rumah tangga sendiri, tersedia fasilitas tetapi digunakan bersama anggota rumah tangga lain dan tertentu, rumah tangga menggunakan fasilitas BAB di MCK komunal atau MCK umum, dan rumah tangga memiliki fasilitas BAB tetapi tidak menggunakan atau rumah tangga yang tidak punya fasilitas BAB. Untuk kondisi yang terakhir ini, biasanya mereka membuang kotoran di sungai/kali, pantai, sawah atau di tempat lainnya. atau juga di tempat lain yang sudah menjadi kebiasaan mereka.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Gambar 8 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2023



Tabel 16 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Penggunaan Fasilitas Tempat BAB, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Ada Fasilitas									
	Digunakan hanya ART sendiri		Digunakan bersama ART ruta lain tertentu/ komunal		di MCK Umum		ART tidak menggunakan		Tidak ada fasilitas BAB	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	95,21	92,39	4,25	6,85	0,23	-	-	-	0,32	0,76
2 Kab. Ponorogo	89,67	89,64	6,28	8,38	0,70	0,07	-	-	3,35	1,91
3 Kab. Trenggalek	88,69	84,50	5,68	10,98	0,43	0,11	0,42	0,07	4,78	4,34
4 Kab. Tulungagung	89,50	91,30	6,48	5,56	0,27	0,00	-	-	3,75	3,14
5 Kab. Blitar	90,51	89,13	6,49	6,80	0,54	0,64	-	-	2,46	3,43
6 Kab. Kediri	92,02	90,84	4,02	6,68	0,08	0,15	0,08	-	3,79	2,33
7 Kab. Malang	90,37	92,89	6,53	4,28	0,28	0,20	-	0,15	2,82	2,48
8 Kab. Lumajang	84,18	85,34	6,15	5,33	0,77	0,28	-	0,28	8,90	8,77
9 Kab. Jember	66,38	70,30	8,29	8,49	1,46	1,13	0,40	0,95	23,48	19,13
10 Kab. Banyuwangi	84,19	86,08	2,72	5,51	0,56	0,61	-	-	12,53	7,80
11 Kab. Bondowoso	50,75	53,24	12,32	19,00	5,72	2,22	0,49	0,80	30,72	24,74
12 Kab. Situbondo	48,06	57,47	19,62	20,28	4,52	-	0,30	0,26	27,50	21,99
13 Kab. Probolinggo	70,55	72,97	6,43	9,12	1,17	0,68	0,34	0,95	21,50	16,28
14 Kab. Pasuruan	88,15	89,77	5,33	5,54	1,03	1,00	0,25	0,44	5,24	3,25
15 Kab. Sidoarjo	93,91	95,45	3,65	3,15	0,93	0,84	0,05	0,02	1,46	0,54
16 Kab. Mojokerto	91,07	85,99	3,14	11,53	0,70	0,71	0,11	0,01	4,97	1,76
17 Kab. Jombang	92,16	90,53	3,91	6,85	0,24	0,34	-	-	3,69	2,28
18 Kab. Nganjuk	86,18	87,91	6,91	7,95	0,60	0,32	-	-	6,31	3,82
19 Kab. Madiun	86,88	87,66	8,30	8,77	-	-	0,15	-	4,67	3,57
20 Kab. Magetan	92,86	90,32	4,00	7,48	0,37	0,23	0,08	0,13	2,68	1,84
21 Kab. Ngawi	85,26	85,09	11,66	12,94	0,07	0,08	0,08	-	2,93	1,89
22 Kab. Bojonegoro	90,95	91,16	4,86	5,47	0,33	0,24	0,41	0,13	3,46	3,00
23 Kab. Tuban	81,16	87,40	6,88	5,62	0,68	0,70	-	0,22	11,28	6,06
24 Kab. Lamongan	94,98	93,28	2,29	5,11	0,01	0,00	0,03	0,12	2,69	1,49
25 Kab. Gresik	97,04	95,66	1,48	4,20	0,36	0,00	-	-	1,12	0,14
26 Kab. Bangkalan	77,75	82,48	14,60	11,43	1,00	4,45	0,02	-	6,63	1,64
27 Kab. Sampang	77,11	80,34	14,79	14,58	0,63	0,42	-	0,22	7,47	4,44
28 Kab. Pamekasan	75,38	80,08	18,74	18,98	1,56	0,10	0,03	-	4,29	0,84
29 Kab. Sumenep	68,34	69,22	20,43	22,31	0,44	0,80	0,03	-	10,76	7,67
71 Kota Kediri	88,79	86,28	8,98	11,83	1,75	1,27	-	-	0,48	0,62
72 Kota Blitar	93,96	88,15	4,92	11,30	0,04	0,00	-	-	1,09	0,55
73 Kota Malang	93,67	92,80	5,35	6,64	0,56	0,16	-	-	0,42	0,40
74 Kota Probolinggo	86,93	86,21	6,60	8,05	1,58	1,69	0,34	0,27	4,56	3,78
75 Kota Pasuruan	89,55	89,01	3,74	5,86	3,39	2,09	0,09	-	3,23	3,04
76 Kota Mojokerto	96,03	92,49	2,72	6,06	0,93	1,45	-	-	0,32	-
77 Kota Madiun	92,01	89,66	6,92	9,64	0,75	0,41	-	-	0,31	0,29
78 Kota Surabaya	85,10	84,22	13,56	14,98	1,26	0,80	-	-	0,08	-
79 Kota Batu	96,81	93,72	1,66	5,61	0,65	0,60	-	-	0,89	0,07
Jawa Timur	84,30	85,26	7,61	8,84	0,89	0,60	0,10	0,17	7,10	5,13

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



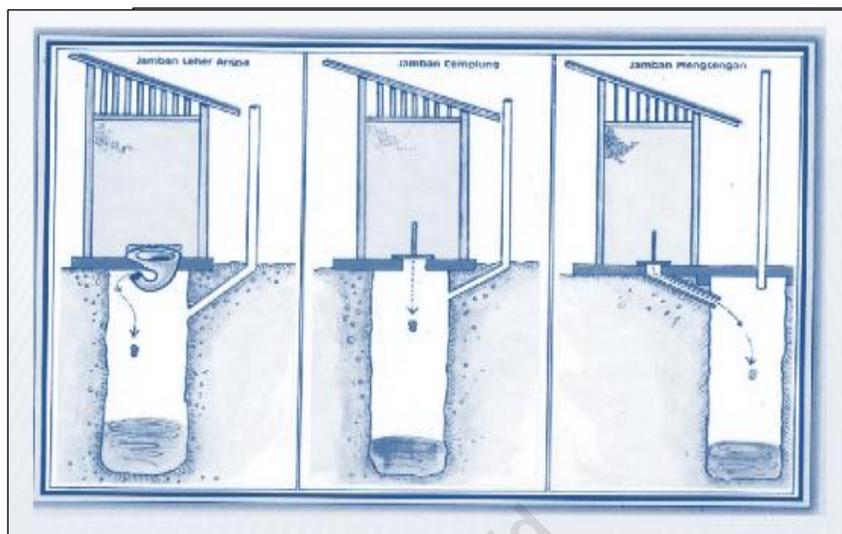
Pada tahun 2023, sebesar 94,87 persen rumah tangga di Jawa Timur memiliki fasilitas BAB, sedangkan selebihnya sebesar 5,13 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas BAB. Diantara rumah tangga yang sudah tersedia fasilitas BAB, diantaranya ada yang digunakan hanya untuk anggota rumah tangga (art) itu sendiri (85,26 persen), ada yang digunakan bersama art rumah tangga lain tertentu atau menggunakan MCK komunal (8,84 persen), ada yang menggunakan di MCK umum (0,60 persen) dan ada rumah tangga yang tersedia fasilitas untuk buang air besar tetapi tidak menggunakannya (0,17 persen).

Meskipun persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas BAB di Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 5,13 persen menunjukkan penurunan persentase dibandingkan tahun 2022, tapi masih terdapat beberapa kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga tanpa fasilitas BAB di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Bondowoso memiliki persentase rumah tangga tanpa fasilitas BAB (24,74 persen) paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

3.3.7 Jenis Kloset yang Digunakan

Berdasarkan jenisnya, kloset yang digunakan oleh rumah tangga terbagi menjadi leher angsa, plengsengan, dan cemplung/cubluk. Pertanyaan jenis kloset ini hanya ditanyakan untuk rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB yang digunakan untuk ART sendiri, digunakan bersama ART lain tertentu, dan juga fasilitas BAB berupa MCK komunal. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga di Jawa Timur yang menggunakan kloset leher angsa sekitar 94,13 persen diikuti persentase rumah tangga dengan kloset cemplung/cubluk sekitar 4,56 persen dan persentase rumah tangga dengan kloset jenis plengsengan sebesar 1,31 persen. Persentase rumah tangga pengguna kloset jenis leher angsa di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan.





Perkotaan (K)	97,04	2,21	0,75
Perdesaan (D)	90,31	7,64	2,05
K + D	94,13	4,56	1,31

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023

Gambar 9 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Wilayah dan Penggunaan Jenis Kloset, 2023

Mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki persentase rumah tangga dengan kloset jenis leher angsa di atas 90 persen pada tahun 2023. Meski demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai persentase tersebut yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Bangkalan memiliki persentase rumah tangga dengan kloset leher angsa terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya dimana hanya terdapat sekitar 59–60 dari setiap 100 rumah tangganya yang menggunakan kloset jenis leher angsa. Kabupaten Bangkalan juga memiliki persentase rumah tangga dengan jenis kloset plongsengan tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Sementara itu, terdapat empat kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga pengguna kloset cemplung/cubluk di atas 10 persen, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Sumenep.



Tabel 17 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kloset yang Digunakan oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat BAB untuk ART Sendiri atau Bersama atau Komunal, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kloset					
	Leher angsa		Plengsengan		Cemplung/Cubluk	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kab. Pacitan	76,28	80,04	3,69	1,63	20,04	18,33
2 Kab. Ponorogo	93,58	91,84	0,41	0,88	6,00	7,28
3 Kab. Trenggalek	85,70	87,58	0,39	0,98	13,91	11,44
4 Kab. Tulungagung	89,93	94,29	3,58	1,42	6,49	4,29
5 Kab. Blitar	91,80	92,07	1,98	1,77	6,22	6,16
6 Kab. Kediri	93,81	96,03	3,79	1,00	2,39	2,97
7 Kab. Malang	93,46	94,37	3,38	2,40	3,16	3,23
8 Kab. Lumajang	87,73	91,26	4,64	1,89	7,64	6,85
9 Kab. Jember	94,65	96,09	0,70	0,88	4,64	3,03
10 Kab. Banyuwangi	96,09	95,60	0,92	1,39	2,99	3,01
11 Kab. Bondowoso	92,87	93,28	1,55	1,66	5,58	5,06
12 Kab. Situbondo	91,35	93,16	2,69	0,57	5,96	6,27
13 Kab. Probolinggo	88,26	90,15	1,18	2,71	10,57	7,14
14 Kab. Pasuruan	92,82	95,06	3,34	0,94	3,84	4,00
15 Kab. Sidoarjo	93,36	98,70	6,48	0,49	0,16	0,81
16 Kab. Mojokerto	97,32	98,23	1,37	0,49	1,31	1,28
17 Kab. Jombang	98,03	97,12	0,82	0,71	1,15	2,17
18 Kab. Nganjuk	90,73	93,50	4,85	2,65	4,42	3,85
19 Kab. Madiun	94,76	96,18	0,98	0,29	4,64	3,53
20 Kab. Magetan	97,74	97,23	0,74	0,61	1,52	2,16
21 Kab. Ngawi	89,97	89,66	1,23	1,34	8,80	9,00
22 Kab. Bojonegoro	95,30	95,86	2,57	1,15	2,13	2,99
23 Kab. Tuban	92,97	93,24	2,95	0,99	4,08	5,77
24 Kab. Lamongan	96,44	97,98	3,18	1,60	0,38	0,42
25 Kab. Gresik	94,35	96,16	4,34	1,19	1,31	2,65
26 Kab. Bangkalan	61,39	59,57	11,24	7,78	27,37	32,65
27 Kab. Sampang	88,68	91,49	2,20	0,63	9,12	7,88
28 Kab. Pamekasan	94,36	96,35	1,68	1,40	3,96	2,25
29 Kab. Sumenep	82,62	87,40	5,22	1,71	12,16	10,89
71 Kota Kediri	99,48	99,45	0,17	0,54	0,34	0,01
72 Kota Blitar	99,43	100,00	0,06	-	0,52	-
73 Kota Malang	93,40	99,60	4,83	0,40	1,76	-
74 Kota Probolinggo	98,91	98,44	0,41	0,46	0,68	1,10
75 Kota Pasuruan	98,70	100,00	0,21	-	1,09	-
76 Kota Mojokerto	98,44	99,82	1,56	0,18	-	-
77 Kota Madiun	96,94	98,95	3,06	0,89	-	0,16
78 Kota Surabaya	98,50	99,73	1,47	0,27	0,03	-
79 Kota Batu	99,18	99,91	0,81	0,06	0,01	0,03
Jawa Timur	92,51	94,13	2,86	1,31	4,63	4,56

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



3.3.8 Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja

Tersedianya tempat pembuangan akhir kotoran sangatlah penting dalam suatu rumah tangga. Dilihat dari sisi kesehatan, kotoran manusia dapat menjadi masalah yang tidak bisa dianggap sepele. Pembuangan kotoran manusia (tinja) secara sembarangan dapat mengakibatkan kontaminasi pada sarana air bersih dan akan mendatangkan bahaya bagi kesehatan anggota rumah tangga. Biasanya rumah tangga yang membuang tinja secara sembarangan disebabkan karena pengetahuan mereka akan kesehatan lingkungan yang sangat kurang, tingkat sosial ekonomi yang rendah dan kebiasaan buruk yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Pada tahun 2023, rumah tangga di Jawa Timur yang membuang kotoran melalui tangki/IPAL sebesar 84,74 persen diikuti rumah tangga yang menggunakan lubang tanah untuk pembuangan akhir kotoran sebesar 11,58 persen. Persentase rumah tangga yang membuang kotoran melalui tangki/IPAL menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 18 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja, 2022 dan 2023

Tempat pembuangan akhir kotoran/tinja	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Tangki/IPAL	84,68	84,74
Kolam/sawah/sungai/danau/laut	1,94	3,47
Lubang tanah	13,06	11,58
Pantai/tanah lapang/kebun	0,16	0,10
Lainnya	0,16	0,11

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



Tabel 19 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja oleh Rumah Tangga dengan Akses Tempat BAB untuk ART Sendiri atau Bersama atau Komunal, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota	Tempat pembuangan akhir kotoran/tinja									
	Tangki/IPAL		Kolam/Sawah /Sungai/ Laut		Lubang tanah		Pantai/tanah lapang/kebun		Lainnya	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kab. Pacitan	56,55	72,92	0,11	0,00	42,70	26,60	0,49	0,29	0,16	0,19
2 Kab. Ponorogo	90,17	91,75	0,52	0,11	9,31	8,06	-	0,08	-	-
3 Kab. Trenggalek	83,46	82,77	1,71	2,46	13,30	14,49	0,68	0,28	0,86	-
4 Kab. Tulungagung	84,57	88,99	1,52	2,65	13,77	8,04	0,14	0,32	-	-
5 Kab. Blitar	76,25	84,94	8,06	6,47	15,60	8,40	0,08	0,19	-	-
6 Kab. Kediri	92,50	92,15	0,68	0,61	6,47	7,24	0,30	-	0,06	-
7 Kab. Malang	75,92	79,38	1,93	2,35	21,89	18,10	0,12	0,11	0,14	0,06
8 Kab. Lumajang	75,08	59,71	0,68	0,92	24,11	39,05	0,07	0,11	0,06	0,21
9 Kab. Jember	89,35	82,90	4,24	13,51	6,37	2,47	-	0,22	0,04	0,90
10 Kab. Banyuwangi	88,25	90,96	3,94	4,49	7,76	4,48	0,05	-	-	0,07
11 Kab. Bondowoso	67,64	68,45	5,00	8,24	26,80	23,08	0,33	-	0,24	0,23
12 Kab. Situbondo	65,09	70,50	0,98	14,44	33,60	15,06	0,33	-	-	-
13 Kab. Probolinggo	67,42	60,90	2,56	5,83	29,56	33,17	0,23	0,02	0,23	0,08
14 Kab. Pasuruan	81,58	88,07	2,42	3,01	15,41	8,67	0,41	0,08	0,19	0,17
15 Kab. Sidoarjo	98,26	97,37	1,39	2,63	0,15	-	-	-	0,19	-
16 Kab. Mojokerto	95,25	93,42	1,81	6,27	2,94	0,25	-	0,06	-	-
17 Kab. Jombang	97,43	98,20	0,44	0,52	2,13	1,28	-	-	-	-
18 Kab. Nganjuk	94,25	93,67	1,20	1,77	4,55	4,56	-	-	-	-
19 Kab. Madiun	89,66	88,36	1,36	1,34	8,57	10,03	0,12	0,10	0,30	0,17
20 Kab. Magetan	90,19	93,77	2,72	1,46	7,08	4,77	-	-	-	-
21 Kab. Ngawi	83,65	84,31	3,55	4,80	12,59	10,81	0,05	0,08	0,15	-
22 Kab. Bojonegoro	96,27	97,35	0,17	0,11	3,55	2,54	-	-	-	-
23 Kab. Tuban	93,13	92,73	1,25	2,06	5,50	5,10	0,12	0,11	-	-
24 Kab. Lamongan	92,22	97,43	1,17	0,68	6,61	1,89	-	-	-	-
25 Kab. Gresik	96,10	98,22	0,61	1,02	2,97	0,71	0,02	0,05	0,29	-
26 Kab. Bangkalan	56,73	44,63	0,51	0,70	40,77	52,84	1,71	1,29	0,29	0,54
27 Kab. Sampang	81,37	81,05	1,74	1,32	15,91	17,48	-	0,12	0,98	0,03
28 Kab. Pamekasan	19,31	35,47	1,22	5,82	78,59	58,71	0,20	-	0,67	-
29 Kab. Sumenep	52,53	38,40	0,63	3,99	45,96	57,27	0,84	0,14	0,04	0,20
71 Kota Kediri	98,24	98,82	1,18	1,12	0,58	0,06	-	-	-	-
72 Kota Blitar	97,06	96,74	2,43	2,82	0,52	-	-	-	-	0,44
73 Kota Malang	89,34	86,95	6,40	13,05	3,98	-	-	-	0,28	-
74 Kota Probolinggo	95,86	93,94	2,72	3,11	1,42	2,95	-	-	-	-
75 Kota Pasuruan	95,94	96,69	3,53	3,31	0,36	-	-	-	0,17	-
76 Kota Mojokerto	98,17	97,90	1,51	2,10	-	-	-	-	0,31	-
77 Kota Madiun	99,26	99,75	0,34	0,25	0,40	-	-	-	-	-
78 Kota Surabaya	99,19	98,80	0,43	0,86	0,03	0,17	-	-	0,35	0,17
79 Kota Batu	96,54	95,57	2,89	4,21	0,57	0,22	-	-	-	-
Jawa Timur	84,68	84,74	1,94	3,47	13,06	11,58	0,16	0,10	0,16	0,11

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 202 dan-2023



Kabupaten/kota yang rumah tangganya masih sering membuang kotoran/tinja di luar tangki septik/IPAL paling banyak berada di Kabupaten Pamekasan dengan persentase sebesar 64,53 persen, diikuti oleh Kabupaten Sumenep dengan persentase sebesar 61,60 persen, dan Kabupaten Bangkalan dengan persentase sebesar 55,37 persen. Tingginya persentase di Kabupaten Pamekasan disebabkan karena masih banyak rumah tangga di kabupaten tersebut yang membuang kotoran/tinjanya di lubang tanah dengan persentase sebesar 58,71 persen, demikian halnya dengan Kabupaten Sumenep disebabkan juga karena banyak rumah tangga yang membuang kotoran/tinja di lubang tanah dengan persentase sebesar 57,27 persen, dan di Kabupaten Bangkalan sebesar 52,84 persen. Sebaliknya, Kota Madiun merupakan satu-satunya kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga yang membuang kotoran/tinja melalui tangki/IPAL mencapai di atas 99 persen.

3.4 Kesehatan Lingkungan

Upaya penyediaan sanitasi dan air minum layak semakin ditingkatkan setiap tahunnya. Hal ini karena sanitasi dan air minum yang layak merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs khususnya sektor lingkungan hidup, salah satu poinnya adalah air bersih dan sanitasi layak dengan memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Tahun 2024, Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh masyarakat telah memiliki akses air minum layak dan 90 persen masyarakat mendapatkan akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 20 persen akses sanitasi layak. Demi tercapainya tujuan tersebut pemerintah pusat maupun daerah membuat berbagai macam program dengan target adalah wilayah dimana masyarakatnya belum memiliki akses sanitasi dan air minum layak. Dengan adanya program dari pemerintah juga perlu dibuat monitoring terhadap capaian program tersebut. Keberhasilan atas capaian program sebetulnya tidak hanya berasal dari tangan



pemerintah saja tetapi juga dibutuhkan kerja sama di dalam masyarakat. Kebiasaan buruk yang masih dilakukan oleh masyarakat sangat menghambat keberhasilan program akses sanitasi dan air minum layak.

3.4.1 Sanitasi Layak

Kriteria sanitasi yang layak adalah apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan pada rumah tangga sendiri atau bersama rumah tangga lain bukan di MCK umum; jenis kloset yang digunakan adalah leher angsa; dan tempat pembuangan akhir kotoran/tinja menggunakan tangki/IPAL khusus untuk daerah perdesaan termasuk juga tempat pembuangan akhir kotoran/tinja ke lubang tanah. Di dalam penghitungan rumah layak huni salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah akses terhadap sanitasi layak. Semakin baik akses terhadap sanitasi layak berarti juga akan memengaruhi angka pada rumah layak huni.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Gambar 10 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2021–2023

Capaian persentase akses terhadap sanitasi layak di Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 83,72 persen, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian angka tahun sebelumnya sebesar 81,13 persen. Persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di perkotaan lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di wilayah perdesaan.



Tabel 20 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2021–2023

Kabupaten/Kota	Akses terhadap sanitasi layak		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Pacitan	71,70	72,64	77,45
2 Kab. Ponorogo	87,49	86,77	89,79
3 Kab. Trenggalek	75,48	79,27	81,28
4 Kab. Tulungagung	85,37	83,60	87,85
5 Kab. Blitar	75,67	80,11	82,50
6 Kab. Kediri	86,92	88,68	92,13
7 Kab. Malang	80,79	81,80	84,03
8 Kab. Lumajang	83,24	77,99	77,48
9 Kab. Jember	64,17	65,95	64,47
10 Kab. Banyuwangi	81,15	78,07	82,63
11 Kab. Bondowoso	52,82	51,64	57,41
12 Kab. Situbondo	59,79	54,52	59,37
13 Kab. Probolinggo	62,14	62,36	66,12
14 Kab. Pasuruan	82,92	83,40	86,70
15 Kab. Sidoarjo	95,05	89,54	94,72
16 Kab. Mojokerto	87,34	89,87	89,38
17 Kab. Jombang	90,95	93,67	94,06
18 Kab. Nganjuk	81,84	83,36	87,83
19 Kab. Madiun	89,09	89,40	91,99
20 Kab. Magetan	88,40	91,01	92,90
21 Kab. Ngawi	79,35	84,26	85,42
22 Kab. Bojonegoro	90,96	91,01	92,63
23 Kab. Tuban	83,80	80,99	85,13
24 Kab. Lamongan	89,70	90,66	95,00
25 Kab. Gresik	91,56	90,29	95,00
26 Kab. Bangkalan	39,44	53,48	50,30
27 Kab. Sampang	76,22	79,33	82,86
28 Kab. Pamekasan	70,85	65,95	71,10
29 Kab. Sumenep	65,66	67,68	70,26
71 Kota Kediri	95,75	95,87	96,41
72 Kota Blitar	96,77	95,91	96,22
73 Kota Malang	87,08	82,61	86,36
74 Kota Probolinggo	89,77	89,27	88,27
75 Kota Pasuruan	92,10	89,32	91,73
76 Kota Mojokerto	95,49	95,59	96,48
77 Kota Madiun	97,31	95,38	98,18
78 Kota Surabaya	95,20	96,41	97,81
79 Kota Batu	95,57	94,37	95,06
Jawa Timur	80,97	81,13	83,72

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023



Peningkatan capaian persentase akses terhadap sanitasi layak dapat mencerminkan gambaran kondisi akses sanitasi layak masyarakat di Jawa Timur yang semakin baik. Meski demikian, terlihat perbedaan yang cukup kentara antara persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di perkotaan dan di perdesaan, bahwa persentase rumah tangga di perkotaan sebesar 86,22 persen jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan sebesar 80,55 persen. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah atau pengambil kebijakan terkait pembangunan bahwa selain melakukan upaya agar meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak setiap tahunnya, juga perlu dilakukan kebijakan yang lebih terarah di wilayah perdesaan agar capaian akses terhadap sanitasi layaknya tidak tertinggal dari wilayah perkotaan. Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo masih merupakan kabupaten/kota di Jawa Timur dengan capaian akses terhadap sanitasi layak terendah, dalam hal ini masih di bawah 60 persen. Sebaliknya, Kota Madiun dan Kota Surabaya memiliki persentase akses terhadap sanitasi layak paling tinggi diantara kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2023.

3.4.2 Air Minum Layak

Sumber air minum rumah tangga dapat dirinci menjadi sumber air minum layak dan tidak layak. Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap sumber air minum layak (*access to improved water*) apabila pada rumah tangga tersebut memiliki akses air minum yaitu sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan/isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci/dll berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.





Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Gambar 11 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, 2021–2023

Capaian akses terhadap sumber air minum layak di Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 96,01 persen. Lebih terinci terlihat bahwa capaian akses terhadap sumber air minum layak di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan. Di wilayah perdesaan, masih terdapat sekitar 5–6 dari tiap 100 rumah tangga yang masih belum memiliki akses terhadap sumber air minum layak.

Mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki capaian akses terhadap sumber air minum layak di atas 95 persen. Meski demikian, masih terdapat delapan kabupaten/kota yang belum mencapai angka tersebut, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sampang. Capaian akses terhadap sumber air minum layak terendah adalah di Kabupaten Lamongan sebesar 79,26 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 20–21 dari setiap 100 rumah tangga di Kabupaten Lamongan yang masih belum memiliki akses terhadap sumber air minum layak.



Tabel 21 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, 2021–2023

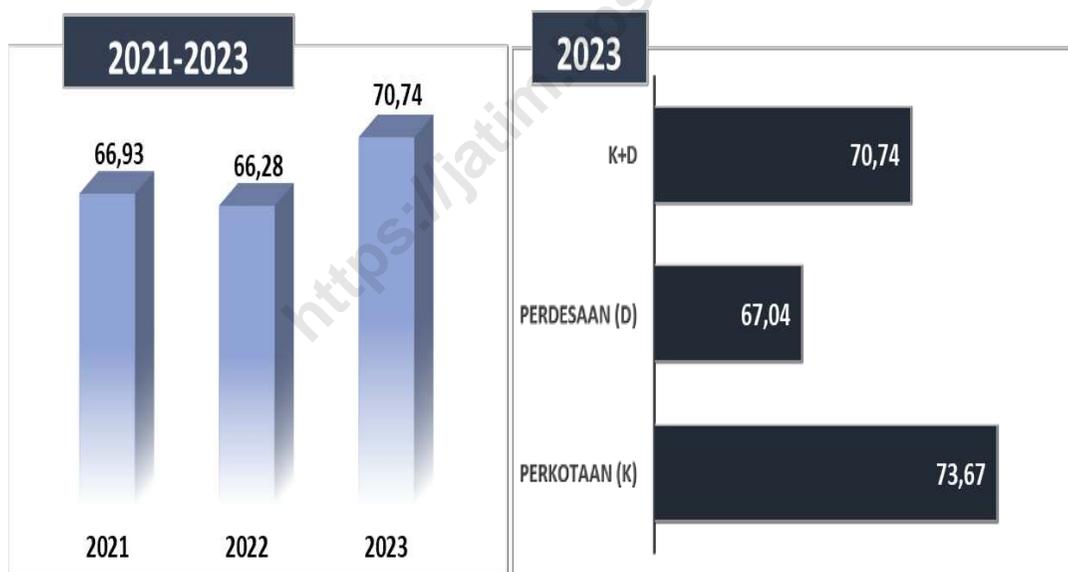
Kabupaten/Kota	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak		
	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kab. Pacitan	76,71	83,95	80,19
2 Kab. Ponorogo	96,30	91,50	94,42
3 Kab. Trenggalek	75,78	81,23	84,87
4 Kab. Tulungagung	97,40	96,39	97,90
5 Kab. Blitar	93,33	96,37	96,41
6 Kab. Kediri	96,35	92,17	92,00
7 Kab. Malang	94,14	96,02	98,18
8 Kab. Lumajang	95,73	97,35	95,49
9 Kab. Jember	94,35	95,40	97,51
10 Kab. Banyuwangi	94,16	95,97	97,44
11 Kab. Bondowoso	93,44	93,31	94,43
12 Kab. Situbondo	98,88	99,22	97,45
13 Kab. Probolinggo	93,18	95,92	97,75
14 Kab. Pasuruan	97,36	96,90	97,63
15 Kab. Sidoarjo	96,82	95,86	97,19
16 Kab. Mojokerto	98,37	97,05	98,90
17 Kab. Jombang	99,44	99,07	98,01
18 Kab. Nganjuk	99,03	98,67	98,86
19 Kab. Madiun	95,10	94,79	96,39
20 Kab. Magetan	99,90	98,71	99,61
21 Kab. Ngawi	99,92	99,16	97,51
22 Kab. Bojonegoro	97,24	96,51	97,59
23 Kab. Tuban	96,40	97,51	95,22
24 Kab. Lamongan	81,98	78,56	79,26
25 Kab. Gresik	88,99	91,50	92,54
26 Kab. Bangkalan	97,39	93,91	96,30
27 Kab. Sampang	89,34	93,25	94,29
28 Kab. Pamekasan	89,15	95,24	97,91
29 Kab. Sumenep	98,29	94,60	98,10
71 Kota Kediri	98,95	99,77	99,60
72 Kota Blitar	97,08	99,10	98,79
73 Kota Malang	99,93	96,76	99,06
74 Kota Probolinggo	99,66	100,00	100,00
75 Kota Pasuruan	99,65	100,00	99,38
76 Kota Mojokerto	99,63	98,65	99,95
77 Kota Madiun	99,53	98,54	99,10
78 Kota Surabaya	98,06	95,66	98,15
79 Kota Batu	100,00	99,12	99,16
Jawa Timur	95,02	95,05	96,01

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023



3.4.3 Rumah Layak Huni (RLH)

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan UU No. 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah turut menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagaimana penjelasan pada bab metodologi, rumah layak huni merupakan indeks komposit yang disusun dari beberapa indikator meliputi indikator ketahanan bangunan (bahan atap, dinding, dan lantai terluas), kecukupan luas lantai per kapita minimal 7,2 m², akses terhadap sumber air minum layak, dan akses terhadap sanitasi layak.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021–2023

Gambar 12 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2021–2023

Kondisi rumah layak huni di Jawa Timur pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase rumah tangga layak huni pada tahun 2023 sebesar 70,74 persen, artinya ada sekitar 7.074 dari tiap 10.000 rumah tangga



yang memiliki akses rumah layak huni. Hal ini juga berarti bahwa sekitar 29,26 persen rumah tangga di Jawa Timur masih belum memiliki akses rumah layak huni. Capaian persentase rumah tangga dengan akses terhadap rumah layak huni di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan. Di wilayah perdesaan Jawa Timur, sekitar sepertiga rumah tangga disana belum memiliki akses rumah layak huni pada tahun 2023.

Terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga dengan rumah tidak layak huni di atas 50 persen pada tahun 2023. Ketiga kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Bangkalan (54,96 persen), Kabupaten Bondowoso (52,09 persen), dan Kabupaten Situbondo (50,23 persen). Sebaliknya, terdapat 13 kabupaten/kota yang memiliki persentase rumah tangga dengan akses terhadap rumah layak huni di atas 80 persen, yaitu Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Batu. Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur masih memiliki persentase rumah tangga dengan akses terhadap rumah layak huni yang masih relatif rendah yaitu sebesar 55,62 persen pada tahun 2023. Artinya, dari setiap 100 rumah tangga di Kota Surabaya, baru terdapat 55–56 diantaranya yang memiliki akses terhadap rumah layak huni, sedangkan sisinya 44–45 diantaranya masih tinggal di rumah tidak layak huni. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya luas lahan dan mahalnya harga lahan di ibu kota menyebabkan luas per kapita menjadi lebih terbatas untuk memenuhi indikator luas lantai per kapita minimal yang masuk ke dalam kriteria rumah layak huni.



Tabel 22 Persentase Rumah Tangga di Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota dan Akses Terhadap Rumah Layak Huni, 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota		Rumah Layak Huni			
		2022		2023	
		Tidak Layak	Layak Huni	Tidak Layak	Layak Huni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kab. Pacitan	40,93	59,07	37,38	62,62
2	Kab. Ponorogo	23,58	76,42	17,84	82,16
3	Kab. Trenggalek	36,90	63,10	33,76	66,24
4	Kab. Tulungagung	27,30	72,70	17,55	82,45
5	Kab. Blitar	27,63	72,37	22,27	77,73
6	Kab. Kediri	23,31	76,69	20,09	79,91
7	Kab. Malang	30,52	69,48	22,73	77,27
8	Kab. Lumajang	29,79	70,21	30,33	69,67
9	Kab. Jember	38,25	61,75	39,20	60,80
10	Kab. Banyuwangi	27,90	72,10	23,09	76,91
11	Kab. Bondowoso	57,07	42,93	52,09	47,91
12	Kab. Situbondo	54,90	45,10	50,23	49,77
13	Kab. Probolinggo	48,21	51,79	40,60	59,40
14	Kab. Pasuruan	32,51	67,49	24,76	75,24
15	Kab. Sidoarjo	25,94	74,06	14,61	85,39
16	Kab. Mojokerto	19,66	80,34	19,21	80,79
17	Kab. Jombang	20,64	79,36	18,86	81,14
18	Kab. Nganjuk	27,56	72,44	22,04	77,96
19	Kab. Madiun	27,62	72,38	22,25	77,75
20	Kab. Magetan	16,02	83,98	9,18	90,82
21	Kab. Ngawi	35,93	64,07	32,82	67,18
22	Kab. Bojonegoro	39,51	60,49	38,10	61,90
23	Kab. Tuban	30,24	69,76	29,89	70,11
24	Kab. Lamongan	36,35	63,65	33,34	66,66
25	Kab. Gresik	28,00	72,00	22,00	78,00
26	Kab. Bangkalan	55,71	44,29	54,96	45,04
27	Kab. Sampang	40,49	59,51	36,71	63,29
28	Kab. Pamekasan	47,66	52,34	40,07	59,93
29	Kab. Sumenep	41,39	58,61	35,95	64,05
71	Kota Kediri	19,80	80,20	15,44	84,56
72	Kota Blitar	10,43	89,57	12,85	87,15
73	Kota Malang	35,88	64,12	26,00	74,00
74	Kota Probolinggo	18,96	81,04	17,77	82,23
75	Kota Pasuruan	21,56	78,44	18,37	81,63
76	Kota Mojokerto	18,52	81,48	14,63	85,37
77	Kota Madiun	13,05	86,95	12,76	87,24
78	Kota Surabaya	45,36	54,64	44,38	55,62
79	Kota Batu	16,36	83,64	11,29	88,71
Jawa Timur		33,72	66,28	29,26	70,74

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan 2023



DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Jawa Timur. 2023. *Statistik Perumahan dan Permukiman 2022*.

Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur

BPS. 2023. *Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2023*. Jakarta: BPS

<https://jatim.bps.go.id>



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



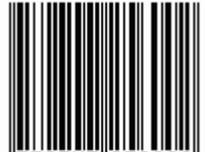
**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya 60292

Telp: (031) 8439343 Fax: (031) 8494007, 8471143

Homepage: <https://jatim.bps.go.id> E-mail: bps3500@bps.go.id

ISSN 2747-2566



9 772747 256002